

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA
DI DESA BANJAR BENAI KECAMATAN BENAI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi
Syarat mencapai Gelar Sarjana Sosial
Program Pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu
Administrasi Negara**



Oleh :

**NAMA : KURNIA PERMADANI
NPM : 160411054**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020
TANDA PERSETUJUAN**

JUDUL : IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA
DI DESA BANJAR BENAI KECAMATAN
BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NAMA : KURNIA PERMADANI

NPM : 160411054

UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS : ILMU SOSIAL

JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

ALSAR ANDRI, S.sos, M.Si

NIDN : 1005108901

EMILIA EMHARIS, S.sos,

M.Si

NIDN :1002059002

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi

DESRIADI, S.Sos,M.Si

NIDN : 1022018302

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **KURNIA PERMADANI**
NPM : 160411054
Universitas : Islam Kuantan Singingi
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul **“Implementasi Sistem Informasi Desa di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi”** yang dibuat untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil tiruan atau duplikasi dari Skripsi yang pernah dipergunakan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di Perguruan Tinggi atau Instansi manapun, kecuali bagian informasi yang dikutip dalam berbagai sumber sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 01 April 2020

Yang Membuat Pernyataan

KURNIA PERMADANI

NPM. 160411054

MOTTO

***JIKA ORANG LAIN BISA,
MENGAPA KITA TIDAK...????***

***BANGUNLAH USAHAMU SENDIRI
WALAUPUN KECIL DAN SEDERHANA
TAPI KITA ADALAH BOSNYA...!!!!***

***SEBAGAIMANAPUN BESARNYA
GAJI SEORANG KARYAWAN
DIA TETAPLAH HANYA SEORANG BAWAHAN***

(KURNIA PERMADANI)

KATA PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan hasil Karya yang Sederhana ini
Untuk Orang-Orang Terkasih.*

AYAH (EDI SAPRI) DAN IBU (ZAINAB)

Orang tua yang sangat aku sayangi dan cintai. Lewat tangan mereka aku diasuh dan dibesarkan. Kedua tangan orang tua adalah sepuluh jari untuk mendoakan anak menjadi yang terbaik dan sukses.

SUAMI (DIKI SAPUTRA) DAN PUTRI (ALMIRA RAJMA FAHLEVI)

Keluarga kecilku yang sangat aku cintai. Semangat hidupku dalam melalui perkuliahan yang dipenuhi dengan lika-liku ini.

KELUARGA BESAR

Terima kasih kepada seluruh keluarga besarku yang selalu mendukungku selama ini. Menyemangatiku dan mendoakan ku dalam usahaku menyelesaikan pendidikan ku ini.

SAHABAT DAN TEMAN

Terima kasih kepada sahabatku (Lusi Kartika, Rani Mardalinda, Triguslina Angelia) yang menemaniku dari awal pendidikan sampai akhir. Dan teman-teman khususnya angkatan 2016 kelas B. Semoga perjuangan kita bisa berakhir sesuai dengan yang kita harapkan.

ALMAMATER TERCINTA

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

By. Kurnia Permadani

ABSTRAK

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA DI DESA BANJAR BENAI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh:

KURNIA PERMADANI

NPM. 160411054

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Sistem Informasi Desa di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Permasalahan dari penelitian ini adalah belum terlaksananya Sistem Informasi Desa di Desa Banjar Benai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan responden berjumlah 39 orang dimana 25 orang menggunakan teknik angket dan 14 orang menggunakan teknik wawancara. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan tentang Implementasi Sistem Informasi Desa di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Belum Terimplementasi.

Kata kunci : Implementasi, Sistem Informasi Desa

ABSTRACTION

**THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE INFORMATION SYSTEM
IN BANJAR BENAI VILLAGE BENAI DISTRICT
KUANTAN SINGINGI REGENCY**

By:

KURNIA PERMADANI

NPM. 160411054

This research aims to find out the Implementation of Village Information System in Banjar Benai Village Benai District Kuantan Singingi Regency. The problem with this research is that the Village Information System has not been implemented in Banjar Benai Village. The type of research used is qualitative and quantitative research. While the respondents numbered 39 people where 25 people used questionnaire techniques and 14 people used interview techniques. The data sources used are primary data and secondary data, while the methods of data collection used are interviews, questionnaires, observations and documentation. Based on the results of research in the field on the Implementation of Village Information System in Banjar Benai Village Benai District Kuantan Singingi Regency has not been implemented.

Keywords: Implementation, Village Information System.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji beserta syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmat-Nya kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA DI DESA BANJAR BENAI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”** ini tepat pada waktunya.

Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar yakni Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Karena berkat perjuangan mereka lah sehingga mereka mampu menerangi kehidupan jahiliyah dan mengantar cahayanya hingga detik ini. Semoga beliau dan para sahabat dapat menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan ini.

Setiap proses kehidupan ini tentu tidak akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan kita, begitupun dengan proses pencarian peneliti di bangku kuliah hingga penulisan skripsi ini penuh hambatan dan rintangan. Namun pada akhirnya semua hambatan tersebut dapat dilalui dengan kuatnya tekad dan dukungan dari berbagai pihak untuk peneliti sehingga selesailah skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula Peneliti tak lupa menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar SE, ME, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta seluruh stafnya, yang telah memberikan kemudahan fasilitas dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial.
3. Bapak Desriadi S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara beserta seluruh stafnya.

4. Bapak Alsar Andri S.Sos, M.Si, selaku Pembimbing I, dan Bapak Emilia Emharis, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing II, yang telah mendorong, membantu, dan mengarahkan peneliti hingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Staf Pengajar, baik Dosen maupun Asistennya, Staf Pegawai di lingkup Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
6. Bapak Edi Sapri selaku Kepala Desa Banjar Benai dan seluruh Aparat Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Orangtua saya Bapak Edi Sapri dan Ibu Zainab yang telah mendukung saya baik moril maupun materil.
8. Suami dan Putri saya Diki Saputra dan Almira Rajma Fahlevi yang selalu *mensupport* saya dalam berjuang menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan karena peneliti masih dalam tahap pembelajaran. Namun, peneliti tetap berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Kritik dan saran dari penulisan skripsi ini sangat peneliti harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan pada skripsi peneliti berikutnya. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih.

Teluk Kuantan, 01 April 2020

KURNIA PERMADANI

NPM. 160411054

DAFTAR ISI

	Halaman
TANDA PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	v
KATA PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRAC.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	10
2.1 Tinjauan Teoritis	10
2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara.....	10
2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan	15
2.1.3 Teori/Konsep Sumber Daya Manusia	20
2.1.4 Teori/Konsep Organisasi	26
2.1.5 Teori/Konsep Implementasi	31
2.1.6 Teori/Konsep Pemerintahan Desa.....	56
2.1.7 Teori/Konsep Sistem Informasi Desa	60
2.2 Kerangka Pemikiran.....	62
2.3 Hipotesis Kerja.....	62
2.4 Defenisi Operasional	63

2.5 Operasional variabel.....	64
BAB III METODE PENELITIAN	65
3.1 Jenis Penelitian.....	65
3.2 Populasi dan Sampel	66
3.3 Sumber Data.....	68
3.4 Fokus Penelitian	68
3.5 Lokasi Penelitian	69
3.6 Metode Pengumpulan Data	69
3.7 Metode Analisis Data	71
3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian	74
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	76
4.1 Sejarah Desa	76
4.2 Demografi.....	77
4.3 Keadaan Sosial	78
4.4 Kondisi Pemerintahan Desa	81
4.5 Tugas Pokok dan Fungsi	82
4.6 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	87
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	88
5.1 Identitas Responden	88
5.2 Hasil Penelitian	91
BAB VI PENUTUP	116
6.1 Kesimpulan.....	116
6.2 Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	xi

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1	Operasional variable tentang implementasi Program Sistem Informasi Desa di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi 64
Tabel III.1	Tabel Responden Penelitian tentang Implementasi Program Sistem Informasi Desa di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi 67
Tabel III.2	Tabel Kategori Jawaban Kuesioner Implementasi Sistem Informasi Desa di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi 73
Tabel III.3	Tabel Jadwal Kegiatan Penelitian 74
Tabel IV.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 78
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 78
Table IV.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 79
Table IV.4	Daftar Rumah Ibadah di Desa Banjar Benai 81
Table V.1	Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin..... 88
Table V.2	Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Usia..... 89
Table V.3	Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan dan Jabatan..... 89
Table V.4	Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 90
Table V.5	Tanggapan Responden tentang Aplikasi Anggaran Desa 91
Table V.6	Tanggapan Responden Tentang Publikasi Anggaran Desa ... 94
Table V.7	Hasil Rekapitulasi Jawaban dari Pertanyaan Pertamadan Kedua Indikator Pertama..... 96
Table V.8	Tanggapan Responden tentang Penggunaan Internet untuk meliha tinformasi Desa 98
Table V.9	Tanggapan Responden tentang Website Desa yang dapat di akses oleh masyarakat 100
Table V.10	Hasil Rekapitulasi Jawaban dari Pertanyaan Pertama dan Kedua Indikator Kedua 101

Table V.11	Tanggapan Responden tentang Akses Internet dalam Penyampaian aspirasi.....	103
Table V.12	Tanggapan Responden tentang Pemanfaatan Internet oleh Pemerintah Desa dalam Berkampaye secara Nasional	105
Table V.13	Hasil Rekapitulasi Jawaban dari Pertanyaan Pertamadan Kedua Indikator Ketiga.....	107
Table V.14	Tanggapan Responden Tentang Produk Khas Desa yang di Promosikan dan di Pasarkan Secara Online.....	109
Table V.15	Tanggapan Responden Tentang Potensi Desa yang Sudah di Promosikan di Media Sosial.....	111
Table V.16	Hasil Rekapitulasi Jawabandari Pertanyaan Pertama dan Indikator Keempat.....	112
Table V.17	Hasil Rekapitulasi Jawaban dari Pertanyaan Indikator Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat	114

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Dimensi Waktu Output dan Outcome.....	36
Gambar II.2 Model Pendekatan The Policy Implementation.....	40
Gambar II.3 Kerangka Pemikiran Implementasi Program Sistem Informasi Desa.....	62
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I	Daftar Kuesioner untuk Responden Penelitian 121
Lampiran II	Daftar Wawancara Untuk Informan Penelitian..... 123
Lampiran III	Dokumentasi Foto Penelitian 124
Lampiran IV	Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 BAB IX pasal 86 128
Lampiran V	Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial..... 129
Lampiran VI	Surat Riset dari Desa..... 130
Lampiran VII	Catatan Bimbingan Skripsi 131
Lampiran VIII	Daftar Riwayat Hidup 132

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan yang baik dan berkualitas memberikan implikasi kepuasan kepada masyarakat, karena masyarakat secara langsung menilai terhadap kinerja pelayanan yang diberikan. Indikator kepuasan masyarakat itulah yang menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan (Hayat, 2017:1).

Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa dengan adanya pelayanan yang maksimal membuat masyarakat menjadi sejahtera dan itu merupakan tujuan dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *Good Governance*. Pelayanan publik sudah menjadi kebutuhan dan perhatian di era otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Hak, Wewenang, dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Hal terpenting dari Otonomi Desa sebagai Daerah Otonom adalah layanan terhadap masyarakat Desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atau kepentingan umum. Hayat mengemukakan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan inti dari sebuah kinerja pelayanan. Kinerja pelayanan menjadi poin penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik.. Kualitas pelayanan publik menjadi barometer bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. Hal itu juga mengindikasikan kualitas sumber daya manusia yang baik, profesional, dan bertanggung jawab serta kompeten (Hayat, 2017:69).

Oleh sebab itu kita dapat mengukur kualitas pelayanan aparatur dengan melihat kesesuaian antara indikator kinerja pelayanan dengan pelayanan yang diterima masyarakat. Apabila pelayanan masyarakat tidak sesuai dengan indikator kinerja pelayanan publik, maka dapat dikatakan bahwa pelayanan dalam instansi tersebut belum maksimal.

Sumber daya manusia tidak bisa bekerja tanpa sarana prasarana. Apalagi kondisi sekarang dengan berbagai perkembangan zaman yang semakin kompleks dan global. Kebutuhan sarana dan prasarana menjadi amat penting untuk menunjang kinerja. Terutama dalam kinerja pelayanan publik yang kebutuhan masyarakat semakin tinggi dalam penerimaan pelayanan. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan semakin tinggi dan instan serba ingin cepat. Kecepatan sebuah pelayanan tidak bisa dilakukan dengan cara manual, harus menggunakan alat atau sarana mesin untuk mendukungnya.

Alat atau sarana adalah media untuk memberikan pelayanan secara maksimal dan profesional. Sejatinya manusia hanya menjalani proses pelayanan, sementara yang mendukung tercapainya kualitas pelayanan adalah sarana prasarana yang digunakan.

Untuk kondisi saat ini, aspek pelayanan publik sudah mengarah kepada penggunaan dan pemanfaatan internet Elektronik *Government (E-Government)* bukan menjadi hal yang tabu, tetapi sudah menjadi kebutuhan bagi setiap elemen

pemerintahan dan masyarakat. Pelayanan dengan menggunakan atau berbasis pada instrumen elektronik sudah menjadi kebutuhan masyarakat masa kini. Hal itu dikarenakan lebih mudah, murah, cepat, baik dan mempunyai kualitas tinggi. Dari aspek waktu pelayanan misalnya, pelayanan yang seharusnya selesai 1 minggu, bisa selesai 1 jam menggunakan alat atau sarana elektronik.

E-Government juga dapat dimaknai sebagai suatu sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat yang berbasis internet untuk merekam dan melacak informasi publik dan memberi akses layanan publik oleh instansi pemerintah (Abidin, 2001)

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kelahiran *e-Government* sendiri adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan. Sudah merupakan fenomena umum bahwa pemerintah di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, penyelenggaraan pemerintahannya memakan biaya yang sangat tinggi (*high cost*), namun sedikit memberikan pelayanan dan responsiv maupun akuntabel. Belajar dari kegagalan-kegagalan pelayanan publik yang dilakukan selama ini serta sulitnya mengubah perilaku dan mentalitas aparatur birokrasi pemerintahan, maka tawaran konsep *e-Government* merupakan strategi inovatif yang mampu memberikan solusi inovatif bagi praktek pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Untuk menciptakan daerah yang menjalankan sistem *e-Government* Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi periode 2016-2021 mengambil tindakan yaitu dengan membentuk program kerjasama pemanfaatan internet antara PT. Indonesia Comnet Plus (ICON+) dengan Kepala Desa Se – Kuantan Singingi. PT. ICON+ merupakan anak perusahaan dari PT. PLN Persero yang

bergerak di bidang telekomunikasi. Dengan membentuk sebuah program yang di beri nama Internet Desa Pintar ini merupakan komitmen Pemerintah Kuantan Singingi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik. Agar terwujudnya transparansi informasi, memperpendek rentang birokrasi dengan sistem online seperti pembuatan KTP, KK, SIUP dan lain sebagainya. Pemerintah Daerah mendorong agar setiap desa dapat memiliki fasilitas internet dalam memberikan informasi untuk pelayanan kepada masyarakat dan menjadi modal dasar untuk menjadikan seluruh Desa di Kabupaten Kuantan Singingi sebagai Desa Pintar menuju *Integritas City*.

Icon Plus selaku penyedia jasa jaringan dan seperangkat peralatan lainnya membebaskan biaya pemasangan internet ini ke anggaran Pemerintah Desa. Pada tahun anggaran 2017 Pemerintah Desa harus merogoh kocek dalam-dalam untuk membayar pemasangan jaringan internet masuk Desa tersebut.

Berdasarkan informasi yang dirangkum, pada tahun anggaran 2017 , Pemerintah Desa harus menganggarkan sebesar Rp.19.800.000,- yang akan dipergunakan untuk internet sebesar Rp.7.500.000,-. Untuk Backhaul sebesar Rp.3.750.000,-. Untuk internet 10 Mbps sebesar Rp.3.750.000,-. Biaya instalasi awal sebesar Rp.3.000.000,-. Ditambah pajak 10 persen senilai Rp.1.800.000,-

Sedangkan untuk pembuatan Hot Spot Area Publik dan pembuatan Web Desa serta pelatihan operator desa digratiskan oleh pihak Icon Plus. Sedangkan pembayaran kuota bulanan, Pemerintahan Desa harus membayar lagi sebesar Rp.3.000.000,- setiap bulannya. Artinya, jika internet desa ini sudah tersambung

ke masing-masing desa maka setiap desa harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp.36.000.000,- dalam setahun hanya untuk bayar kuota internet

Desa Banjar Benai adalah salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Desa Banjar Benai merupakan salah satu Desa yang menjalankan program Internet Desa Pintar ini. Pemerintah Desa Banjar Benai juga menanda tangani nota persetujuan dengan PT. ICON+ yang berlangsung di SMAN Pintar Teluk Kuantan pada Agustus 2017 lalu. Program ini sudah satu tahun di jalankan di Desa Banjar Benai.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab IX tentang “Sistem informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan” pasal 86. Adapun isi dari Undang-Undang tersebut diatas adalah:

- a. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- c. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- d. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

- e. Sistem informasi Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- f. Pemerintah Daerah Kabupaten/kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Dilihat dari Undang-Undang diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan adanya program Internet Desa Pintar ini adalah :

1. Transparansi anggaran Desa.
2. Pengembangan Sistem Informasi Desa
3. Media Komunikasi Desa
4. Media Promosi

Tujuan yang pertama yaitu Transparansi anggaran Desa, dengan adanya transparansi anggaran Desa maka masyarakat dapat dengan mudah melihat untuk keperluan apa saja dana Desa tersebut di anggarkan oleh Pemerintah Desa. Transparansi anggaran dana Desa ini tidak hanya dapat di publikasikan secara langsung saja melainkan dapat juga di publikasikan secara online melalui aplikasi anggaran Desa maupun grup-grup di media sosial.

Yang kedua adalah Sistem Informasi Desa, sama halnya dengan permasalahan diatas Sistem Informasi Desa juga tidak dapat di akses oleh masyarakat karena Desa Banjar Benai tidak memiliki halaman Web Desa sebagai media Informasi Desa yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan para Perangkat Desa mengenai pengelolaan Sistem Informasi Desa berbasis internet.

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Masalah utama pada pelaksanaan program internet di Desa Banjar Benai ini adalah Pemerintah Desa telah memutuskan perjanjian secara sebelah pihak (*wanprestasi*) dimana dalam perjanjian disebutkan bahwa Pemerintah Desa harus berlangganan minimal selama tiga tahun, akan tetapi Pemerintah Desa hanya menggunakan jasa internet selama dua tahun saja. Alasan Pemerintah Desa yaitu mereka merasa kecewa dengan layanan dari Pt. ICON Plus yang tidak sesuai dengan janji yaitu mereka berjanji akan memberikan pelatihan kepada operator Desa untuk menggunakan internet sebagai alat dalam melayani masyarakat. Kemudian pembuatan Web Desa secara gratis yang tidak kunjung di buat oleh Pt.ICON Plus tersebut.

Program ini dinilai warga sangat mubazir karena tidak di kelola oleh Pemerintah Desa dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal masuknya jaringan internet di Desa. Keluhan ini pun dapat kita lihat di media massa Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana informasi ini dapat kita akses melalui media online yaitu situs *kuansingterkini.com* dimana judul beritanya yaitu “Belum Dibutuhkan Masyarakat, Program Internet Desa Pintar di Kuansing dinilai Mubazir” berita ini di publikasikan pada hari selasa tanggal 01 agustus 2017.

Tidak adanya pembekalan yang diberikan oleh penyedia jasa yaitu Pt. Icon Plus terhadap operator Desa membuat Pemerintah sulit memahami pemanfaatan

dari program ini. Seperti janji mereka yang akan membuat situs Web Desa secara gratis dan pembekalan operator desa dalam pengelolaan program ini. Kurangnya sarana dan prasarana di dalam Kantor Kepala Desa membuat terbatasnya aktivitas pelayanan terhadap masyarakat secara elektronik maupun online. Sehingga membuat sistem informasi desa yang seharusnya dapat di laksanakan secara online tidak terlaksana di Desa Banjar Benai ini.

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa banyak faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya Sistem Informasi Desa dengan baik dikarenakan faktor sumber daya aparatur yang masih kurang, evaluasi, sarana prasarana, dan sikap dari aparatur Desa yang belum baik. Dengan adanya masalah ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang program ini dengan judul penelitian **“IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA DI DESA BANJAR BENAI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI“**

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan penelitian tersebut diatas, maka permasalahan Implementasi Sistem informasi Desa di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Bagaimana implementasi Sistem informasi Desa di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu :

“Untuk mengetahui implementasi Sistem informasi Desa di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi”

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- 1.4.1 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kita khususnya dalam kajian-kajian tentang kebijakan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi yang berguna bagi masyarakat dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.
- 1.4.2 Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih positif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan para implementor kebijakan dalam menentukan dan menjalankan kebijakan untuk meningkatkan peran dan partisipasi aktif dalam pengimplementasian program Sistem informasi Desa ini.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Teoritis.

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi negara.

Istilah Administrasi Negara dapat dibagi kedalam dua bentuk yakni Administrasi dan Negara. Administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu *administrare* yang berarti melayani, membantu. Sedangkan dalam bahasa Inggris, menggunakan istilah *administration* yang sebenarnya dari kata *Ad* (*intensif*) dan *ministrare* (*to serve*) yang berarti melayani. Sedangkan Negara secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *State* yang artinya dalam bahasa Latin yaitu *status* yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau lebih sering disebut *station* yang berarti kedudukan.

Secara terminologi apa yang disebut Administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibubuhi dengan awalan *pe* dan akhiran *an* pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengeloan dan pengaturan adalah terciptanya dalam susunan dan pengaturan dinamikanya. Administrasi adalah kerjasama yang di dasarkan pada esensi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama (Ali,2015:23).

Pada dasarnya administrasi melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan adanya banyak orang terlibat dalamnya. Hal ini sesuai dengan pengertian administrasi

yang dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas .

Administrasi dalam arti sempit adalah penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lainnya. Administrasi dalam arti sempit ini sebenarnya lebih tepat disebut dengan tata usaha. Sedangkan administrasi secara luas adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam arti luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerja sama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang teratur dalam proses, tujuan yang akan dicapai, dan pemanfaatan berbagai sumber (Siagian,2001:38).

Menurut Kranenbrug Negara adalah suatu pola sistem dari pada tugas umum organisasi-organisasi yang diatur dalam usaha Negara mencapai tujuannya, dimana tujuan tersebut juga menjadi tujuan rakyat atau masyarakat yang diliputi maka harus ada yang berdaulat (dalam Syafiie,2005:25). Menurut Aristoteles negara adalah persekutuan dan keluarga, Desa guna untuk memperoleh kesejahteraan hidup sebaik-baiknya. Menurut Hugo de Groot Negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dan orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum (dalam Syafiie,2010:22).

Administrasi publik sebenarnya sudah ada semenjak dahulu kala, ia akan timbul dalam suatu masyarakat yang terorganisasi. Dalam catatan sejarah

peradaban manusia, maka di Asia Selatan termasuk Indonesia, Cina, dan Mesir Kuno dahulu sudah didapatkan suatu sistem penataan pemerintah. Sistem penataan tersebut pada masa sekarang dikenal dengan sebutan Administrasi Publik atau Administrasi Negara (Thoha,2008:88). Administrasi sebagai fungsi menunjukkan keseluruhan tindakan dari sekelompok orang dalam satu kerjasama sesuai dengan fungsi-fungsi tertentu sehingga tercapai tujuan. Fungsi yang satu berhubungan dengan fungsi yang lain dalam satu rangkaian tahapan aktivitas.

Dalam kegiatannya Hendri Fayol memisahkan fungsi administrasi kedalam lima aspek pokok yang penting yaitu:

- a. Merencanakan
- b. Mengorganisasian
- c. Memimpin
- d. Melaksanakan pengorganisasian
- e. Melaksanakan pengawasan (dalam Anggara,2012:144).

Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Siagian,2002:2).

Selain itu juga ada beberapa ciri-ciri administrasi, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kelompok manusia yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih.
2. Adanya kerjasama
3. Adanya proses usaha
4. Adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan.
5. Adanya tujuan (Siagian,2001:2)

Ciri-ciri administrasi disebutkan Thoha, sebagai berikut:

- a. Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (*unavoidable*).

Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan dengan administrasi negara. Mulai dari lahir hingga meninggal dunia, orang tidak bisa melepaskan diri dari sentuhan kegiatan administrasi negara, baik warga negara maupun orang asing.

- b. Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan.

Hal ini administrasi negara mempunyai monopoli untuk mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan.

- c. Administrasi negara mempunyai prioritas.

Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh administrasi negara. Dari sekian banyaknya tersebut tidak lalu semuanya diborong olehnya. Prioritas diperlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat.

- d. Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas.

Besar lingkup kegiatan administrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, di laut dan di udara.

- e. Pimpinan atasnya (*top management*) bersifat politis.

Administrasi negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pimpinan tertinggi dari administrasi negara dijabat oleh pejabat

yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

- f. Pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit diukur.

Oleh karena kegiatan administrasi negara sebagiannya bersifat politis dan tujuan diantaranya untuk mencapai perdamaian, keamanan, kesehatan, pendidikan, keadilan, kemakmuran, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaan, maka hal tersebut tidak mudah untuk diukur.

- g. Banyak yang diharapkan dari administrasi negara.

Dalam hubungan ini akan terdapat dua standar penilaian. Satu pihak masyarakat menghendaki administrasi negara berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di pihak lain administrasi negara mempunyai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber-sumber lain yang terbatas.

Fungsi yang dimaksud dianggap sebagai *basic process of administration*, yang terdiri dari:

1. Fungsi menentukan apa yang akan dilakukan (*planning*)
2. Menggolong-golongkan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rangkaian hubungan (*organizing*).
3. Menyusun orang-orang yang tepat melakukan masing-masing jenis kegiatan (*staffing*).
4. Menggerakkan dan memberi instruksi agar hasil pelaksanaan relatif sesuai dengan yang diharapkan (*controlling*).

Menurut Chander dan Plano, administrasi negara adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan sikoordinasikan untuk diformulasikan, mengimplementasikan, mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Dalam defenisi ini lebih menekankan aspek keterlibatan personel dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah (dalam Pasolong,2010:7).

Administrasi negara terkadang disebut juga sebagai administrasi publik, karena terjemahan dari kata *public administration*. Karena kata *public* diterjemahkan menjadi Negara maka akan terasa serba kekuasaan yang menzalimi masyarakat. Tetapi bila diterjemahkan sebagai masyarakat, akan berkonotasi pelayanan berakibat pada kebebasan liberalistik. Untuk itu perlu keseimbangan dalam sistem administrasi negara.

2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan.

Dalam percakapan sehari-hari kata “publik” mempunyai dua arti yang berbeda. Pertama, *public* diartikan sebagai negara atau pemerintah seperti dalam terjemahan *public administration* menjadi administrasi negara. Kedua, kata publik sebagai kata dari kata “umum” seperti *public telephone* (telepon umum), *public transportation* (transportasi umum), atau *public interest* (kepentingan umum). Menurut asal katanya (etimologis), istilah publik merupakan serapak dari bahasa inggris *public* yang juga memiliki dua makna atau bentuk. Pertama, sebagai kata benda (*the public*) yang berarti *the community in general* atau *part of community having a particular interest in common*. Kedua, sebagai kata sifat (*public*) yang

dapat berarti dengan segala sesuatu yang menyangkut masyarakat atau orang banyak (Agustino, 2017:6).

Kebijakan merupakan istilah yang seringkali kita dengar dalam konteks pemerintahan atau perpolitikan. Istilah kebijakan memiliki cakupan yang sangat luas. Kata *policy* yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga administrasi pemerintah (Hasbullah,2015:37).

Menurut Dye kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan, kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu (dalam Agustino,2008:7).

Menurut pendapat Carl Frederich, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (dalam Wahab,2004:3).

Menurut Ealau dan Prewit, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (dalam Suharti,2010:7). Titmus mendefenisikan kebijakan sebagai “prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahka kepada tujuan-tujuan tertentu”. Kebijakan menurut Titmuss senantiasa berorientasi kepada masalah (*problemoriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu

ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Jones menjelaskan beberapa isi dari kebijakan, diantaranya:

1. Isi kebijakn yang pertama adalah tujuan. Yang dimaksud adalah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai (*the desired ends to be achieved*); bukan sesuatu tujuan yang diinginkan saja.
2. Rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya.
3. Program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
4. Keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyelesaikan masalah, serta melaksanakan dan mengevaluasi program.
5. Dampak (*effect*), yakni dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat. (dalam Abidin,2012:6)

Karakteristik utama kebijakan menurut Agustino yaitu:

1. Pada umumnya kebijakan perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak.
2. Kebijakan pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya, suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk

mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya.

3. Kebijakan merupakan yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontor inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
4. Kebijakan dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat melintakan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
5. Kebijakan, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah (Agustino,2012:8).

Di Indonesia sendiri telah banyak contoh kegagalan implementasi kebijakan maupun program. Kegagalan yang terjadi di Indonesia tidak jauh berbeda dari kegagalan yang ditemukan di negara lain. Setidaknya ada enam faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi, yaitu :

1. Kualitas kebijakan itu sendiri yaitu kejelasan tujuan, kejelasan implementor atau penanggung jawab implementasi, dan lainnya. Kualitas kebijakan juga ditentukan oleh proses perumusan kebijakan, apakah kebijakan tersebut dirumuskan secara demokratis atau tidak.

2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran). Suatu kebijakan atau program tidak akan bisa mencapai tujuan atau sasaran tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai. Secara hipotesis dapat dirumuskan bahwa semakin besar anggaran yang diperuntukkan bagi suatu kebijakan, maka semakin besar pula peluang keberhasilan untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan.
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya). Struktur organisasi yang terlalu hirarkis akan menghambat proses kebijakan.
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran. Karakteristik kelompok sasaran akan sangat mempengaruhi dukungan kelompok sasaran terhadap proses implementasi.
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi kebijakan dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif (Purwanto,2012:85).

Suharto mengatakan istilah kebijakan sosial diartikan sebagai kebijakan yang menyangkut aspek sosial dalam pengertian spesifik, yakni yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial (Suharto,2014:9).

Pengertian kebijakan sosial seperti ini selaras dengan pengertian-pengertian perencanaan sosial sebagaimana dikemukakan oleh Conyers. Menurut

Conyers, perencanaan sosial adalah perencanaan perundang-undangan tentang pelayanan kesejahteraan sosial yang pertama kali muncul di Eropa Barat dan Amerika Utara. Sehingga meskipun pengertian perencanaan sosial diintegrasikan secara meluas, dimasyarakat Barat berkembang anggapan bahwa perencanaan sosial senantiasa berkaitan erat dengan perencanaan kesejahteraan sosial (Conyers, 1992).

Huttman (1981), dan Gilbert dan Specht (1986) melihat kebijakan dari tiga sudut pandang, yakni kebijakan sosial sebagai proses (*process*), sebagai produk (*product*), dan sebagai kinerja atau capaian (*performance*). Sebagai suatu proses, kebijakan sosial menunjuk pada tahapan perumusan kebijakan dalam kaitannya dengan variabel-variabel sosio-politik dan teknik-metodologis. Kebijakan sosial merupakan suatu tahapan untuk membuat sebuah rencana tindak (*plan of action*) yang dimulai dari pengidentifikasian kebutuhan (*assessing need*), penetapan alternatif-alternatif tindakan, penyeleksian strategis-strategis kebijakan, sampai pada evaluasi terhadap pengimplementasian kebijakan. Magill (1986) memberi istilah terhadap makna kebijakan sebagai proses ini sebagai pengembangan kebijakan (*policy development*) yang maknanya menunjuk pada proses perumusan kebijakan (*policy formulation*).

2.1.3 Teori/Konsep Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia adalah orang-orang yang ada dalam organisasi yang memberikan sumbangan pemikiran dan melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Sumbangan yang dimaksud adalah pemikiran dan pekerjaan yang mereka lakukan di berbagai kegiatan dalam perusahaan.

Dalam pengertian sumber daya manusia, yang diliput bukanlah terbatas kepada tenaga ahli, tenaga pendidikan ataupun tenaga yang berpengalaman saja tetapi semua tenaga kerja yang digunakan perusahaan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya (Sukirno, 2006:172).

Kata “Sumber Daya” menurut Poerwadarminta, menjelaskan bahwa dari sudut pandang etimologis kata “sumber” diberi arti “asal” sedangkan kata “daya” berarti “kekuatan” atau “kemampuan”. Dengan demikian sumber daya artinya “kemampuan”, atau “asal kekuatan”. Pendapat lain mengatakan bahwa Sumber Daya diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan tertentu, atau meloloskan diri dari kesukaran sehingga perkataan sumber daya tidak menunjukkan suatu benda, tetapi dapat berperan dalam suatu proses atau operasi yakni suatu fungsi operasional untuk mencapai tujuan tertentu seperti memenuhi kepuasan. Dengan kata lain sumber daya manusia merupakan suatu abstraksi yang mencerminkan aspirasi manusia dan berhubungan dengan suatu fungsi atau operasi (Martoyo, 1992:2).

Untuk memahami pengertian Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dibedakan antara pengertiannya secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun memperoleh pekerjaan. Di samping itu SDM secara makro berarti juga penduduk yang berada dalam usia produktif, meskipun karena berbagai sebab dan masalah masih

terdapat yang belum produktif karena belum memasuki lapangan kerja yang terdapat di masyarakatnya (Hanggraeni, 2012:35).

SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain-lain. Sedang secara lebih khusus SDM dalam arti mikro di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan pengertiannya dapat dilihat dari tiga sudut:

1. SDM adalah orang yang bekerja dan berfungsi sebagai aset organisasi yang dapat dihitung jumlahnya.
2. SDM adalah potensi yang menjadi motor penggerak organisasi.
3. Manusia sebagai sumber daya adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai penggerak organisasi berbeda dengan sumber daya lainnya. Nilai-nilai kemanusiaan yang dimilikinya mengharuskan sumber daya manusia diperlakukan secara berlainan dengan sumber daya lainnya (Hasibuan, 2010:76).

Penjelasan mengenai manusia sebagai sumber daya menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang unik dan kompleks, yang dalam bekerja di lingkungan sebuah perusahaan harus diperlakukan dengan kualitas kehidupan kerja yang baik agar memungkinkannya bekerja secara efektif, efisien, produktif dan berkualitas. Di antaranya dalam bentuk memberikan kesempatan untuk berpartisipasi mengembangkan karirnya, diperlakukan adil dalam menyelesaikan konflik yang dihadapinya, disupervisi secara jujur dan obyektif, memperoleh upah yang layak dan lain lain (Mangkunegara, 2001:56)

Sumber daya manusia adalah seluruh kemampuan atau potensi penduduk yang berada di dalam suatu wilayah tertentu beserta karakteristik atau ciri demografis, sosial maupun ekonominya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan. Jadi membahas sumber daya manusia berarti membahas penduduk dengan segala potensi atau kemampuannya. Potensi manusia menyangkut dua aspek yaitu aspek kuantitas dan kualitas. Karakteristik demografi merupakan aspek kuantitatif sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk menggambarkan jumlah dan pertumbuhan penduduk, penyebaran penduduk dan komposisi penduduk.

Karakteristik sosial dan ekonomi berhubungan dengan kualitas (mutu) sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara, sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang ada baik secara fisik maupun mental. Sumber daya manusia atau penduduk menjadi aset tenaga kerja yang efektif untuk menciptakan kesejahteraan. Kekayaan alam yang melimpah tidak akan mampu memberikan manfaat yang besar bagi manusia apabila sumber daya manusia yang ada tidak mampu mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam yang tersedia. Demikianlah kita harus memahami betapa pentingnya mengupayakan agar sumber daya alam berkualitas tinggi sehingga tidak menjadi beban bagi pembangunan. Kekayaan yang paling berharga dalam suatu organisasi ialah Sumber daya manusia.

Sumber daya manusia merupakan investasi sangat berharga bagi sebuah organisasi yang perlu dijaga. Setiap organisasi harus mempersiapkan program yang berisi kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme

SDM supaya organisasi bisa bertahan dan berkembang sesuai dengan lingkungan organisasi. Untuk mencapai produktivitas yang maksimum, organisasi harus menjamin dipilihnya tenaga kerja yang tepat dengan pekerjaan serta kondisi yang memungkinkan mereka bekerja optimal.

Ciri-ciri sumber daya manusia yang produktif adalah tampak tindakannya konstruktif, percaya diri, mempunyai rasa tanggungjawab, memiliki rasa cinta terhadap pekerjaannya, mempunyai pandangan jauh kedepan, dan mampu menyelesaikan persoalan (Umar, 2004:24). Ciri-ciri sumber daya manusia yang produktif adalah cerdas dan dapat belajar dengan relatif cepat, kompeten secara profesional, kreatif dan inovatif, memahami pekerjaan, belajar dengan cerdas, menggunakan logika, efisien, tidak mudah macet dalam pekerjaan, selalu mencari perbaikan-perbaikan, tetapi tahu kapan harus berhenti, dianggap bernilai oleh atasannya, memiliki catatan prestasi yang baik, selalu meningkatkan diri.

Manfaat dari adanya pengembangan SDM, yaitu:

1. Peningkatan produktifitas kerja.
2. Terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan.
3. Tersedianya proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
4. Meningkatnya semangat kerja seluruh anggota dalam organisasi.
5. Mendorong sikap keterbukaan manajemen.
6. Memperlancar jalannya komunikasi yang efektif.
7. Penyelesaian konflik secara fungsional (Siagian, 2003:183).

Konsep SDM memiliki tiga pengertian, yaitu:

1. SDM adalah personil, tenaga kerja, karyawan yang bekerja dilingkungan organisasi.
2. SDM adalah potensi manusia sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
3. SDM adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non-material dan non-finansial) di dalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi (Bacar, 2000:47).

Konsep SDM terdapat juga filosofi, yaitu:

1. Pegawai atau karyawan dipandang sebagai investasi, jika dikelola dengan perencanaan yang baik akan memberikan imbalan bagi organisasi dalam bentuk produktivitas yang lebih besar,
2. Manajer membuat berbagai kebijakan, program dan praktik yang memuaskan baik bagi kebutuhan ekonomi maupun kepuasan karyawan,
3. Manajer menciptakan lingkungan kerja yang di dalamnya para pegawai didorong untuk menggunakan keahlian serta kemampuan semaksimal mungkin,.
4. Program dan praktik personalia diciptakan dengan tujuan agar terdapat keseimbangan antara kebutuhan karyawan dan kebutuhan organisasi (Jones, 2009:41).

2.1.4 Teori/Konsep Organisasi.

Organisasi berasal dari kata *organ* (sebuah kata dalam bahasa Yunani) yang berarti alat. Stephen P. Robbins mendefinisikan organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan (dalam Fahmi, 2016:2). Ada beberapa pengertian dari beberapa ahli mengenai organisasi. Menurut Mc. Farland organisasi adalah suatu kelompok manusia yang dapat dikenal yang menyumbangkan usahanya terhadap tercapainya suatu tujuan (dalam Handayani, 1981:42).

Sedangkan menurut Dimock menyatakan definisi Organisasi adalah perpaduan secara sistematis daripada bagian-bagian yang saling ketergantungan atau berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan (dalam Handayani, 1981:42)

Dari penjelasan di atas maka organisasi merupakan sarana atau alat bagi orang-orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan yang di dalamnya terdapat hubungan kerja yang saling berhubungan satu sama lain. Berdasarkan definisi-definisi di atas ciri-ciri organisasi sebagai berikut :

1. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal.
2. Adanya kegiatan yang berbeda-beda tapi satu sama lain saling berkaitan.
3. Tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya ataupun tenaganya.

4. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan.

5. Adanya suatu tujuan (Handayani, 1981:43).

Organisasi dapat dilihat dari segi yang statis (teori klasik) dari segi yang dinamis atau proses (pendekatan sistem). Teori klasik memandang pengertian organisasi dari segi wadah atau wujud, sedangkan teori sistem memandang organisasi sebagai suatu proses. Berdasarkan kedua pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pengertian organisasi bisa bermacam-macam atau tergantung dari mana mereka memandang, sehingga pemahaman terhadap organisasi semakin lengkap. Pengertian organisasi ke dalam dua makna tersebut yang minimal perlu diketahui, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengertian organisasi dalam makna yang statis.

Beberapa ahli yang diambil pendapatnya yaitu: (1) Arif (1995) menegaskan bahwa organisasi adalah kerjasama orang-orang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai; (2) Malinowski menegaskan bahwa organisasi sebagai suatu kelompok orang yang bersatu dalam tugas-tugas atau tugas umum, terikat pada lingkungan tertentu, menggunakan alat teknologi dan patuh pada peraturan (dalam Arif, 1995), serta Henry L. Sisk menegaskan organisasi sebagai sebagai suatu kesatuan yaitu sekelompok orang terlibat secara bersama-sama di dalam hubungan yang resmi untuk mencapai tujuan-tujuan; (3) Siagian (2003) menegaskan bahwa organisasi adalah tempat dimana kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan. Sebagai wadah, organisasi bersifat relatif statis

dan memiliki pola dasar struktur organisasi yang reatif permanen; (4) Soedjadi (1995) menegaskan organisasi pada pokoknya adalah sekelompok manusia yang dengan sengaja dipersatukan dalam suatu kerjasama yang efisien untk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

2. Organisasi sebagai suatu proses.

Pengertian organisasi sebagai suatu proses atau yang bersifat dinamis akan dikutip beberapa pendapat antara lain: (1) Soedjadi (1995) menegaskan bahwa organisasi dapat juga dipandang sebagai suatu sistem dan bentuk hubungan antara wewenang dan tanggung jawab antara atasan dan bawahan dalam rangka pencapaian tujuan dengan cara yang sudah ditetapkan dan yang paling efisien; (2) Siagian (2003) menegaskan organisasi sebagai proses interaksi antara orang – orang didalam organisasi. Organisasi sebagai suatu proses menimbulkan dua jenis hubungan didalam organisasi yaitu hubungan formal yang menimbulkan organisasi formaldan hubungan informal yang menimbulkan organisasi informal; (3) Barnard menegaskan organisasi merupakan suatu sistem sosial yang dinamis dari hubungan kerja sama yang bertujuan untuk memuaskan keperluan orang – orang (Dalam Arif, 1995).

Beberapa defenisi organisasi pada poin satu yang telah diungkapkan mengkaji pengertian organisasi sebagai suatu wadah kerjasama manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal ini bermakna bahwa mereka memandang organisasi dalam pengertian

yang statis. Dalam makna yang demikian Soedjadi memandang bahwa organisasi dapat memberikan kepastian dan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan hubungan kerjasama manusia, sedangkan poin dua memberikan makna dari sudut dinamis atau menggunakan teori sistem.

Arif menyatakan bahwa organisasi sebagai suatu sistem yang berproses terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu dengan yang lain menjadi satu kesatuan secara keseluruhan. Bagian-bagian itu terdiri dari faktor-faktor luar dan dalam organisasi. Faktor luar organisasi adalah faktor lingkungan dimana organisasi itu berada seperti faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya, teknologi, hukum, demografi, sumber-sumber alam, langganan, nasabah dan lain sebagainya, sedangkan faktor dalam antara lain orang-orang yang bekerja, tugas dan tanggung jawab, hubungan kerja dan lain-lain.

Dengan demikian, makna organisasi dipandang dari segi proses dapat menimbulkan dinamika organisasi.

Menurut James D. Mooney, Organisasi adalah sebagai bentuk perserikatan orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Chester, Organisasi adalah sebuah sistem tentang aktivitas kerja sama dua orang atau lebih dari sesuatu yang tidak terwujud dan tidak dipandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi. Selanjutnya Luther Gulick mengemukakan bahwa organisasi adalah sebagai suatu alat saling berhubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan. Jadi, dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan

kepada bawahan yang menjangkau dari puncak sampai kedaras dari seluruh badan usaha (dalam Syafiie, 2010:51).

Manusia adalah makhluk sosial yang cenderung untuk hidup bermasyarakat serta mengatur dan mengorganisasikan kegiatannya dalam mencapai suatu tujuan. Tetapi karena keterbatasan kemampuan menyebabkan mereka tidak mampu mewujudkan impian tanpa adanya kerjasama. Adapun unsur-unsur organisasi secara sederhana memiliki tiga unsur, yaitu:

a. *Man* (orang-orang)

Man (orang-orang), dalam kehidupan organisasi atau ketatalembagaan sering disebut dengan istilah pegawai atau personel. Pegawai atau personel terdiri dari semua anggota atau warga organisasi, yang menurut fungsi dan tingkatannya terdiri dari unsur pimpinan (*administrator*) sebagai unsur pimpinan tertinggi dalam organisasi, para manajer yang memimpin suatu unit satuan kerja sesuai dengan fungsinya masing-masing dan para pekerja (*non management/workers*). Semua itu secara bersama-sama merupakan kekuatan manusiawi (*man power*) organisasi.

b. Kerjasama.

Kerjasama merupakan suatu perbuatan bantu-membantu akan suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.

c. Tujuan.

Tujuan merupakan arah atau sasaran yang dicapai. Tujuan menggambarkan tentang apa yang akan dicapai. Tujuan menggambarkan tentang apa yang akan dicapai atau yang diharapkan. Tujuan merupakan titik akhir tentang apa yang harus dikerjakan.

2.1.5 Teori/Konsep Implementasi.

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan (Wahab, 2001:65). Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah atau swasta. Dunn mengistilahkan implementasi secara khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurut nya implementasi kebijakan (*policy implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu (Dunn,2003:132).

Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi), mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Denis A. Rodinelli mengemukakan bahwa terdapat beberap faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah bersifat desentralistis. Faktor-faktor tersebut diantaranya :

- a. Kondisi Lingkungan.

Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima proram.

b. Hubungan Antar Organisasi.

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program .

c. Sumberdaya Organisasi untuk Implementasi Program.

Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non human resources*).

d. Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana.

Yang dimaksud dengan karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program (Subarsono,2005:101).

Menurut Schubert mengemukakan bahwa “implementasi adalah sistem rekayasa”. Pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, dan mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapisuatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Jadi

implementasi dapat juga diartikan mempresentasikan hasil desain ke dalam pemograman (dalam Nurdin dan Usman,2002:70).

Daniel Mazmanian dan Paul Sebatier dalam bukunya *implementation and public policy* mendefenisikan kebijakan sebagai :”Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tugas dan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya” (dalam Agsutino,2008:139).

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses penerjemahan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan (Agustino,2017:126). Sedangkan menurut Lester dan Steward : “Implementasi kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program” (dalam Winarno,2012:147).

Sementara Ripley dan Franklin berpendapat bahwa : “Implementasi adalah yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata

(*tangible output*)” (dalam Winarno,2012:147). Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tidak jauh berbeda dengan yang diutarakan oleh Grindle: “Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya ditentukan dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual proyek dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai” (dalam Agustino,2008:139).

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan sistem kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Udoji bahwa: “Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikannya” (dalam Agustino,2008:140).

Implementasi melibatkan usaha dari *policymaker* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran(*target group*). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan suatu badan yang berfungsi sebagai implementor. Sebaliknya, untuk kebijakan makro maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai instansi, seperti birokrasi Kabupaten, Kecamatan, Pemerintahan Desa (Subarsono,2010:88).

Implementasi kebijakan menurut Nugroho pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Sementara itu Abidin menjelaskan bahwa: “Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya merupakan transformasi yang multiorganisasi. Oleh karena itu, strategi implementasi mengaitkan kepentingan yang terakomodasikan, semakin besar kemungkinan suatu kebijakan berhasil diimplementasikan” (Abidin,2012:163).

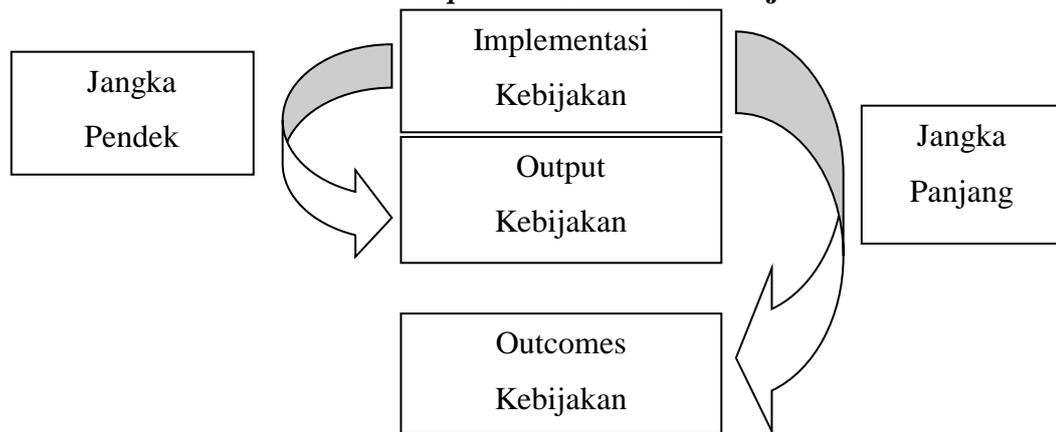
Dari beberapa definisi di atas dapat dirumuskan definisi implementasi kebijakan sebagai tindakan atau usaha melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan pada perumusan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh individu, pejabat atau kelompok tertentu seperti pemerintah atau swasta.

Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementor, dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu atau lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program di lapangan. Kelompok sasaran adalah menunjuk para pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan (Indiahono,2017:143).

Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan. *Output* adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan.

Output biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. *Outcomes* adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya *output* kebijakan. *Outcomes* biasanya diukur setelah keluarnya *output* atau dalam waktu lama pasca implementasi kebijakan.

Gambar II.1 Dimensi Waktu *Output* dan *Outcomes* Kebijakan.



(Sumber:Indiahono,2017:143)

Setelah cukup luas membahas tentang pengertian tentang implementasi kebijakan publik, maka pada uraian selanjutnya akan dijelaskan tentang model-model implementasi kebijakan publik yang diperkenalkan oleh: Donal van Metter & Carl van Horn (1975), George C. Edward III (1980), Merilee S. Grindle (1980), Daniel H. Mazmanian & Paul A. Sabatier (1983), Thomas R. Dye (1992), dan Charles Jones (1996).

A. Model Implementasi Kebijakan – Van Meter & Van Horn.

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Van Metter & Van Horn disebut dengan istilah *A Model of Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih

kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel, menurut van Meter & van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik (Agustino,2017:133).

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuasn kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakann di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber daya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas

dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber finansial dan waktu. Ini karena mau-tidak-mau ketiks sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedai, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisai formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaan. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan 'dari atas' (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

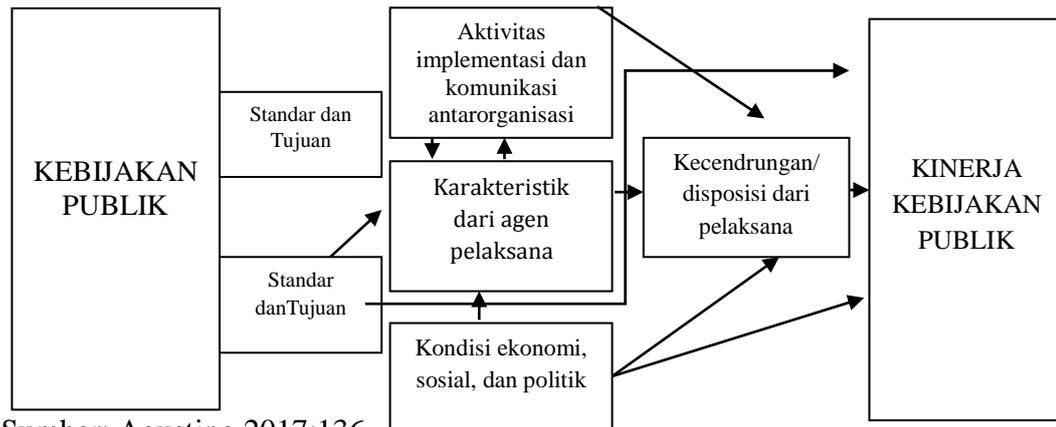
Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan

kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kondusifitas kondisi lingkungan eksternal.

Gambar II.2 Model Pendekatan *The Policy Implementation*.



Sumber: Agustino, 2017:136

B. Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III.

Model implementasi kebijakan ketiga yang berperspektif *top-down* dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteorematkan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi (Agustino, 2017:137).

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut Edward III, adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah

mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisi informasi) diperlukan agar pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Sering kali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah mempengaruhi beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada aturan tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak di capai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
- c. Konsistensi; perintah yang di berikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk di terapkan dan di jalankan). Ini

karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak tercukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang-orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh hukum.

- c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
- d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C. Edward III, adalah disposisi. Disposisi atau 'sikap dari pelaksana kebijakan' adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa

yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal-hal penting yang harus dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III, adalah:

- a. Efek Disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b. Melakukan Pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*); dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada 'pembentukan' sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *bypassing* personil.
- c. Insentif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh

para pembuat kebijakan memengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau menambah biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

Variabel keempat, menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walau pun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atasu para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik adalah;

- a. Membuat *Standar Operating Procedures* (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti

aparatur, administrator, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya (*days-to-days-politics*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).

- b. Melaksanakan Fragmentasi; tujuannya untuk menyebar tanggung jawab pelbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan fragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

C. Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle.

Model keempat dibahas oleh Mirilee S. Grindle (1980).pendekatannya dikenal dengan nama *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih).Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai.dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.

- b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan *suatu* implementasi kebijakan publik menurut Grindle juga amat ditentukan oleh tingkat *implementability yang terdiri atas Content of Policy dan Context of Policy* (1980: 5).

1. *Content of Policy* menurut Grindle adalah:

- a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Interest Affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

- b. *Type of Benefits*(tipe manfaat)

Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

- c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap *kebijakan* mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

- d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam melaksanakan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari Suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. *Program Implentator* (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dalam kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksana suatu kebijakan juga harus di sukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaan nya berjalan dengan baik.

2. *Context of Policy* menurut Grindle adalah:

a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat).

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak di implementasikan akan jauh arang dari api.

b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan di mana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal lain yang dirasakan penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.

Sedangkan pendekatan *bottom up*, memandang implementasi kebijakan dirumuskan tidak oleh lembaga yang tersentralisasi dari pusat. Pendekatan *bottom up* berpangkal dari keputusan-keputusan yang ditetapkan di level warga atau masyarakat yang merasakan sendiri persoalan dan permasalahan yang mereka alami. Jadi intinya pendekatan *bottom up* adalah model implementasi kebijakan dimana formulasi kebijakan berada di tingkat warga, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mampu menganalisis kebijakan-kebijakan apa yang cocok dengan

sumberdaya yang tersedia di daerahnya, sistem sosiokultur yang ada agar kebijakan tidak bersifat kontraproduktif, yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan itu sendiri.

D. Implementasi Kebijakan Model W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Menurut Hugwood dan Gunn untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat:

1. Berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga atau badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.
2. Apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu.
3. Apakah perpaduan sumber-sumber daya yang diperlukan benar-benar ada.
4. Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang handal.
5. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya, semakin sedikit hubungan sebab-akibat, semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai.
6. Apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling kebergantungan tinggi, implementasi tidak akan berjalan secara efektif apalagi jika hubungannya adalah hubungan kebergantungan.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.

9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunikasi adalah perekat organisasi, dan koordinasi adalah asal muasal dari kerjasama tim serta terbentuknya sinergi.

E. Implementasi Kebijakan Model Daniel H. Mazmanian & Paul A. Sabatier.

Model implementasi kebijakan publik yang lain ditawarkan oleh Mazmanian & Paul A. Sabatier. Model implementasi yang ditawarkan mereka disebut dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Dan, variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu:

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi:
 - a. Kesukaran-kesukaran teknis.

Tercapai atau tidaknya suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk di antaranya: kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah. Di samping itu, tingkat keberhasilan suatu kebijakan di pengaruhi juga oleh tersedianya atau telah dikembangkannya teknik-teknik tertentu.

- b. Keberagaman perilaku yang diatur.

Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsi nya semakin beragam pelayanan yang diberikan sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas. Dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus dikontrol oleh para pejabat dan pelaksana (aparatur, adminsitrator, dan birokrat).

- c. Persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran.

Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.

2. Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Dikehendaki.

Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar atau sulit para pelaksana mencapai keberhasilan. Artinya, ada sejumlah masalah yang jauh lebih dapat kita kendalikan jika tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidaklah terlalu besar.

3. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat.

Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara:

- a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai.

Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas skala prioritas atau urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor lainnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa *output* kebijakan dari badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut.

- b. Keterandalan Teori Kausalitas yang Diperlukan.

Memuat suatu teori kausalitas yang menjelaskan bagaimana kira-kira tujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan.

- c. Ketetapan Alokasi Sumber Dana.

Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal.

- d. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan di antara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana.

Salah satu ciri penting yang harus dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana. Ketika kemampuan untuk menyatupadukan dinas, badan, dan lembaga alpa dilaksanakan, maka koordinasi antar-instansi yang bertujuan mempermudah jalannya

implementasi kebijakan justru akan membuyarkan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

- e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memperkecil jumlah titik veto, dan intensif yang memadai bagi kepatuhan kelompok sasaran, suatu undang-undang harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

- f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam Undang-Undang.

Para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang disyaratkan demi tercapainya tujuan. Hal ini sangat signifikan halnya, oleh karena, *top-down policy* bukanlah perkara yang mudah untuk diimplankan pada para pejabat pelaksana di level lokal.

- g. Akses formal pihak-pihak lain.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauh mana peluang-peluang yang terbuka bagi partisipasi para aktor di luar badan pelaksana dapat mendukung tujuan resmi. Ini maksudnya agar kontrol pada para pejabat pelaksanaan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

- 4. Variabel Di Luar Undang-Undang yang Mempengaruhi Implementasi.

a. Kondisi waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-undang. Karena itu, eksternal faktor juga menjadi hal penting untuk diperhatikan guna keberhasilan suatu upaya pengejawatahan suatu kebijakan publik.

b. Dukungan publik.

Hakikat perhatian publik yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan sentuhan dukungan dari warga. Karena itu, mekanisme partisipasi publik sangat penting artinya dalam proses pelaksanaan kebijakan publik di lapangan.

c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat.

Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila di tingkat masyarakat, warga memiliki sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan pada mereka. Ada semacam *local genius* (kearifan lokal) yang dimiliki oleh warga yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau ketidak berhasilan implementasi kebijakan, dan, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh sikap dan sumber yang dimiliki oleh warga masyarakat.

d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

Kesepakatan para pejabat instansi merupakan fungsi dari kemampuan undang-undang untuk melembagakan pengaruhnya pada badan-badan pelaksana melalui penyeleksian institusi-institusi dan pejabat-pejabat terasnya. Selain itu, kemampuan berinteraksi antar lembaga atau individu di dalam lembaga untuk menyukseskan implementasi kebijakan menjadi hal penting atas keberhasilan kinerja kebijakan publik.

2.1.6 Teori/Konsep Pemerintahan Desa.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati (Widjaja,2014:3).

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepada desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang sesuai dengan dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan.

Yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa. Lembaga kemasyarakatan Desa merupakan mitra pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.

Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan Pemerintah daerah, pendataan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Berdasarkan hak asal usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara sengketa dari para warganya. Dalam upaya peningkatan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan, dibentuk kelurahan sebagai unit pemerintahan kelurahan yang berada di dalam daerah kabupaten dan/atau kota (Widjaja, 2014:4).

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan :”Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditentukan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul yang bersifat istimewa”. Selanjutnya dalam perjalanan disebutkan juga sebagai berikut:

- a. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.
- b. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek en locale rechtsgemeenschappen*) atau daerah administrasi belaka, semuanya ditetapkan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang.

- c. Di daerah-daerah bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendikan atas dasar permusyawaratan (Widjaja,2014:8-9).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan PemerintahanDesa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul, dan adat istiadat Desa. Sebagaimana tercantum dalam pasal 19, Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala Desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 1 yaitu:

- a. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa.

- b. Melaksanakan pembangunan Desa
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa
- d. Pemberdayaan masyarakat desa

Pasal 26 ayat 2:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
4. Menetapkan Peraturan Desa
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
6. Membina kehidupan masyarakat Desa; membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
7. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
8. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
9. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
10. Mengembangkan kehidupan sosial buday masyarakat Desa
11. Memanfaatkan teknologi tepat guna
12. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
13. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

14. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.1.7 Konsep Sistem Informasi Desa.

Sistem Informasi Desa atau biasa disebut SID adalah ekosistem baru dalam rangka menyuntikkan teknologi ke desa. Ekosistem yang dibangun dengan adanya SID memungkinkan masyarakat melihat kebebasan informasi untuk diakses tanpa adanya otoritas ataupun penguasa yang membatasi.

Sistem Informasi Desa adalah bagian tak terpisahkan dalam implementasi Undang-Undang Desa. Dalam Bagian Ketiga UU Desa Pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan jelas disebutkan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pasal 86

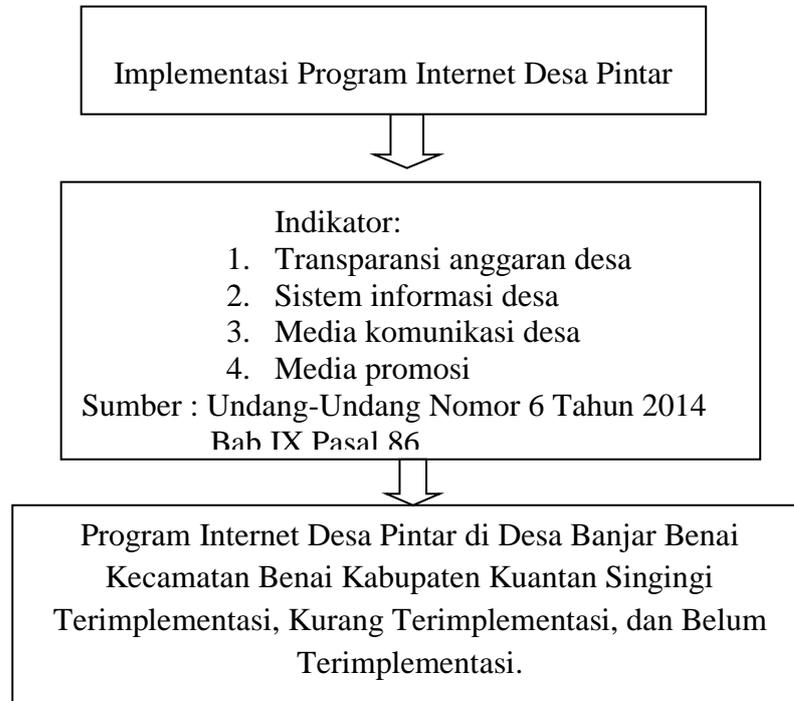
1. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui system informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan system informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
3. Sistem informasi Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta um berdaya manusia.

4. Sistem informasi Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
5. Sistem informasi Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa. (UU 6 Tahun 2014 TentangDesa).

Aplikasi Teknologi Sistem Informasi Desa tentunya berhubungan dengan data-data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berisi tentang data Nomor Induk Kependudukan - NIK dan Nomor Kepala Keluarga. Jadi Sistem Informasi untuk Desa adalah sistem yang mengawal banyak hal dalam pelayanan kependudukan salah satu aspeknya adalah keakuratan dan kecepatan dalam pelayanan publik di Desa.

2.2 Kerangka Pemikiran.

Gambar II.3 Kerangka Pemikiran Implementasi Program Internet Desa Pintar



Sumber: Modifikasi Peneliti, 2020

2.3 Hipotesis Kerja.

Hipotesis kerja merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru di dasarkan pada teori yang relevan, belum di dasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2013:70).

Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga Program Internet Desa Pintar di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi belum terimplementasi.

2.4 Defenisi Operasional.

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini, maka berikut ini dijelaskan konsep yang digunakan sebagai acuan penelitian ini. Adapun yang akan diteliti dalam penelitian ini mengenai Implementasi Internet Desa Pintar di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dengan indikator.

2.4.1 Transparansi Anggaran Desa.

Sesuai Peraturan Pemerintah, penggunaan anggaran Desa harus transparan. Dengan aplikasi anggaran Desa melalui internet, Pemerintah Desa dapat update penggunaan anggaran di web Desa dan warga bisa memantau realisasi anggaran Desa

2.4.2 Sistem Informasi Desa

Dengan Sistem Informasi Desa Online menjadikan Pemerintah Desa dapat update data Desa dengan mudah serta dapat diakses dengan cepat oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Membuka peluang investasi.

2.4.3 Media Komunikasi Desa.

Dengan menggunakan internet, Pemerintah Desa bisa dengan mudah menyebarkan informasi kepada seluruh warga Desa, seperti berita penting, pengumuman warga, peringatan dini, regulasi baru, dan lainnya

2.4.4 Media Promosi

Cara yang paling efektif untuk memasarkan produk ke luar Desa adalah dengan promosi melalui internet. Produk desa yang dijual dapat berupa hasil ternak, hasil kebun, kerajinan atau produk berciri khas lainnya, obyek wisata, dan lainnya.

2.5 Operasional Variabel.

Tabel II.1 : Operasional Variabel Tentang Implementasi Program system Informasi Desa di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

Variabel	Konsep	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
Implementasi Program Internet Desa Pintar	Tujuan Program Internet Desa Pintar	1. Transparansi Anggaran Desa	a. Aplikasi Anggaran Desa b. Publikasi Anggaran Desa	Terimplementasi Kurang Terimplementasi Belum Terimplementasi
		2. Sistem Informasi Desa	a. Dapat di akses oleh Pemerintah daerah secara Online b. Media Informasi Resmi menggunakan Website	Terimplementasi Kurang Terimplementasi Belum Terimplementasi
		3. Media Komunikasi Desa	a. Penyampaian Aspirasi Masyarakat b. Media Kampanye Pemerintah	Terimplementasi Kurang Terimplementasi Belum Terimplementasi
		4. Media Promosi	a. Pemasaran Produk khas Desa b. Promosi potensi alam Desa dengan media sosial.	Terimplementasi Kurang Terimplementasi Belum Terimplementasi

Sumber: Modifikasi Peneliti 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan analisa data kualitatif dan kuantitatif. Penelitian survey adalah satu cara yang utama untuk mengumpulkan data primer bila data sekunder dianggap belum cukup lengkap untuk menjawab sesuatu pertanyaan (Mubyanto dan Suratno, 2016:76).

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain yang diteliti dan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan (Sugiyono, 2016:11).

Menurut Bogdan dan Taylor mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (dalam Trijono, 2015:17).

Sedangkan metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012:8).

Penelitian ini menggunakan dua metode penelitian yaitu Kualitatif dan Kuantitatif yaitu untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentang Implementasi

Sistem Informasi Desa di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2012:119).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Banjar Benai yang berjumlah 4.368 orang.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017:91). Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan rumus *slovin* sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Taraf Kesalahan (*error*) sebesar 0.2 (2%)

dari rumus diatas maka besarnya jumlah sampel (n) adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{4368}{1 + 4368(0.2)^2}$$

$$= \frac{4368}{1 + 174.72}$$

$n = 24.85773$ dibulatkan menjadi 25 orang.

Jadi, jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 25 orang.

Berikut data Responden yang akan peneliti jadikan sampel dalam memudahkan peneliti memperoleh informasi tentang Sistem Informasi Desa di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel III.1 : Tabel Sampel Penelitian Tentang Sistem Informasi Desa Di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Sekretaris Desa	1	1	100%
3	Kepala Seksi	2	2	100%
4	Kepala Urusan	2	2	100%
5	Staf Sekretariat	1	1	100%
6	Kepala Dusun	7	7	100%
7	Masyarakat	4.368	25	0.6%
Jumlah		4.372	39	0.9%

Sumber : ModifikasiPeneliti 2020

Jumlah keseluruhan sampel yang peneliti butuhkan adalah sebanyak 39 orang untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang sedang diteliti. Untuk keseluruhan jumlah Perangkat Desa di Desa Banjar Benai adalah sebanyak 14 orang dan peneliti memilih semuanya sebagai informan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu teknik *sampling jenuh*. *Sampling Jenuh* adalah

teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2014:96).

Untuk metode pengumpulan data dari seluruh Perangkat Desa, peneliti menggunakan metode wawancara. Masyarakat Desa Banjar Benai keseluruhannya berjumlah 4.368 jiwa, dan peneliti mengambil sampel sebanyak 25 orang dengan metode penarikan sampel menggunakan rumus slovin. Untuk metode pengumpulan data terhadap masyarakat, peneliti menggunakan metode kuesioner.

3.3 Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto,2002:107). Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.3.1 Data primer

Yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa Banjar Benai yang menyediakan layanan internet dan masyarakat sebagai penerima layanan.

3.3.2 Data sekunder

Yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

3.4 Fokus Penelitian

Penetapan fokus dapat membatasi studi atau membatasi bidang inkuiri, yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi – eksklusi atau memasukkan-mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Mungkin data cukup menarik, tetapi jika dipandang tidak relevan, data itu tidak akan dihiraukan (Moelong,2002:62).

Fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Sistem Informasi Desa di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan ditetapkan lokasi penelitian akan dapat memudahkan untuk mengetahui tempat dimana suatu penelitian dilakukan.

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan total luas wilayah Desa adalah 27 km². Tepatnya berbatasan langsung dengan Desa Talontam Benai dan Desa Gunung Kesiangan.

3.6 Metode Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

3.6.1 Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan

pertanyaan dan terwawancara (interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moelong,2002:133).

Teknik ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan Sistem Informasi Desa di Desa Banjar Benai.

3.6.2 Angket (*Kuesioner*)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Sugiyono, 2013:162).

3.6.3 Pengamatan (*Observasi*)

Menurut Arikunto observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti. Serta pencatatan secara sistematis. Selanjutnya Poerwandi berpendapat bahwa *observasi* merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Semua bentuk penelitian, baik itu kalitatif maupun kuantitatif mengandung aspek *observasi* di dalamnya. Istilah *observasi* diturunkan dalam bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan”. Istilah *observasi* diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut (dalam Gunawan,2015:143).

3.6.4 Dokumentasi (*Documentation*)

Kata dokumen berasal dari bahasa latin yaitu *docore*, yang berarti mengejar. Pengertian dari kata dokumen ini menurut Gottschalk seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian, yang pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian kedua diperuntukkan bagi surat-surat Negara seperti surat perjanjian, undang-undang, konsensi dan lainnya. Lebih lanjut, Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang di dasarkan atas jenis sumber daya apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis (Gunawan,2015:175).

3.6.5 Gabungan (*Triangulasi*)

Triagulasi adalah istilah yang diperkenalkan oleh Denzim yaitu penggabungan berbagai metode dalam suatu kajian tentang gejala tertentu. Keandalan dan kesalihan data dijamin dengan membandingkan data yang diperoleh dari satu sumber atau metode tertentu, dengan data yang di dapat dari sumber atau metode lain. Triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tetapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya. (Gunawan,2015:217)

3.7 Metode analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam olah, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga daat ditemukan tema dan temat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moelong,2004:280).

Model ini ada empat komponen yaitu:

3.7.1 Pengumpulan Data

Yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

3.7.2 Reduksi data

Yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak penelitian memfokuskan wilayah penelitian.

3.7.3 Penyajian data

Yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan, penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.

3.7.4 Penarikan kesimpulan

Yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan menggunakan teknik persentase dimana hasil dari jawaban responden diukur dengan melihat persentase tertinggi dan di sajikan dalam bentuk tabel dan uraian. Untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil kuesioner yang peneliti lakukan maka teknik pengukurannya sebagai berikut :

Kategori Jawaban	
Sudah/Sering/Pernah/Iya/Ada/	Terimplementasi
Ragu-Ragu/Sekali-Sekali	Belum Terimplementasi
Belum/Tidak Pernah/Tidak/Tidak Ada	Tidak Terimplementasi

Sumber:Modifikasi Peneliti 2020

Dengan menggunakan teknik persentase maka setiap kategori jawaban dengan persentase terbesar dapat dijadikan hasil akhir jawaban responden terhadap kuesioner tersebut.

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Penelitian Implementasi Program Internet Desa Pintar di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

Jenis Kegiatan	Bulan dan Tahun																															
	Feb 2020				Maret 2020				Apr 2020				Mei 2020				Juni 2020				Juli 2020				Agst 2020							
Seminar Proposal																																
Revisi Proposal																																
Penelitian																																
Pengumpulan Data																																
Analisis Data																																
Bimbingan Penelitian																																
Ujian Skripsi																																
Revisi Skripsi																																

Sumber Data : Modifikasi Penelitian Tahun 2020

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa

Desa Banjar Benai dahulunya hanyalah berbentuk komunitas permukiman penduduk dengan jumlah jiwa yang masih sedikit, yang tersebar di tepi aliran sungai batang kuantan dan kawasan perkebunan karet rakyat dengan pola berkebun secara tradisional. Disamping berkebun karet, mata pencaharian masyarakat juga bertani dan buruh tanam. Karena perkembangan berbagai macam jenis tanaman perkebunan maka beberapa tahun terakhir masuklah investor ke wilayah Desa Banjar Benai dan kemudian membangun pabrik pengolahan kelapa sawit menjadi minyak sehingga masyarakat pun mulai beralih dari petani karet menjadi berkebun kelapa sawit.

Kecamatan Benai memiliki tiga Kenegerian yaitu Kenegerian Benai, Kenegerian Siberakun dan Kenegerian Simandolak. Desa Banjar Benai termasuk kedalam Kenegerian Benai yaitu Desa Benai Kecil, Kelurahan Benai, Desa talontam Benai, Desa Koto Benai dan Desa Banjar Benai. Dalam wilayah Desa Banjar Benai terdapat perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh PT. Duta Palma Nusantara dimana secara administrasi seluruh karyawan perusahaan tersebut termasuk sebagai masyarakat Desa Banjar Benai.

4.2 Demografi

4.2.1 Batas Wilayah Desa

Secara geografis, Desa Banjar Benai merupakan salah satu Desa dari 16 Desa yang ada di kecamatan Benai. Adapun batas wilayah Desa Banjar Benai adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : PT. RAPP
2. Sebelah Timur : Desa Gunung Kesiangan
3. Sebelah Selatan : Desa Siberakun
4. Sebelah Barat : Desa Talontam Benai

4.2.2 Luas dan *Orbitrasi* (Jarak Desa)

Luas wilayah Desa Banjar Benai adalah 27km² . Yang terdiri dari lahan perkebunan, kantor, fasilitas umum, dan pemukiman penduduk. Jarak Desa Banjar Benai dari pusat pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Ibu Kota Kecamatan : 3 km
- b. Ibu Kota Kabupaten : 23 km
- c. Ibu Kota Provinsi :160 km

4.2.3 Penduduk

Penduduk Desa Banjar Benai merupakan masyarakat yang Heterogen dimana Desa Banjar Benai ini dihuni oleh berbagai suku bangsa, antara lain Suku Jawa, Batak, Minang, dan Melayu. Jumlah penduduk Desa Banjar Benai adalah 4.368 jiwa, dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.276

jiwa, sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 2.092 jiwa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	2276	52.1%
2	Perempuan	2092	47.9%
Jumlah		4.368	100%

Sumber : Desa Banjar benai 2020

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk masyarakat Desa Banjar Benai lebih banyak jumlah laki-laki daripada perempuan. Adapun jumlah laki-laki 2.276 jiwa dengan persentase 52.1% dan perempuan berjumlah 2.092 jiwa dengan persentase 47.9%.

4.3 Keadaan Sosial

4.3.1 Mata Pencaharian

Secara umum mata pencarian pokok warga masyarakat Desa Banjar Benai memiliki beberapa jenis seperti Petani, Pekebun, Pedagang, PNS/Guru, Karyawan Swasta, Pensiunan dan Kuli Bangunan. Berdasarkan data penduduk yang ada di Desa Banjar Benai mayoritas masyarakat bekerja sebagai Petani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	1610	36.9%
2	PNS/Guru	8	0.2%
3	Pedagang	139	3.2%
4	Karyawan Swasta	1145	26.2%
5	Lain-lain/tidak tetap	1466	33.5%
Jumlah		4368	100%

Sumber: Desa Banjar Benai 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas penduduk Desa Banjar Benai bekerja sebagai Petani yaitu 36.9% dari total jumlah penduduk. Selain Petani, masyarakat Desa Banjar Benai juga mayoritas bekerja sebagai Karyawan Swasta di perusahaan perkebunan sawit yang berada di wilayah Desa Banjar Benai yaitu 26.2% dari jumlah penduduk. Untuk pekerjaan tidak tetap maupun lain-lain seperti ibu rumah tangga, pelajar, pensiunan dan lansia itu memiliki jumlah 33.5% dari jumlah keseluruhan penduduknya. Dan masyarakat yang berprofesi sebagai PNS/Guru hanya 0.2% dari total keseluruhan jumlah penduduk.

4.3.2 Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisa pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Di Desa Banjar Benai ini memiliki beberapa sarana pendidikan. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah :

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Sarana Pendidikan	Jumlah (Gedung)
1	PAUD	1

2	TK	2
3	SD	2
4	SMP	1
Jumlah		5

Sumber: Desa Banjar Benai 2020

Berdasarkan tabel IV.3 diatas dapat kita ketahui bahwa terdapat satu gedung Pendidikan Anak Usia Dini belum lama ini di bangun oleh Pemerintah Desa Banjar Benai. Untuk gedung Taman Kanak-Kanak Desa Banjar Benai memiliki dua gedung yaitu gedung pertama terletak di tengah-tengah wilayah Desa Banjar Benai sedangkan Gedung kedua berada di lingkungan perusahaan yang ada di Desa Banjar Benai. Sama hal halnya dengan gedung Taman Kanak-Kanak, gedung Sekolah Dasar juga terletak di tengah-tengah kawasan penduduk Desa Banjar benai dan Kawasan Perusahaan pengolahan Sawit. Untuk Sekolah Menengah Pertama terdapat di lingkungan Perusahaan yang berstatus swasta.

4.3.3 Agama

Desa Banjar Benai memiliki masyarakat yang beragam suku dan agama. Hal ini disebabkan banyaknya pendatang yang keluar masuk perusahaan yang berada di kawasan Desa Banjar Benai ini. Rata-rata pekerja ini berasal dari daerah Pulau Jawa, Kalimantan dan Provinsi Sumatera Utara dengan kata lain mereka berasal dari suku dan agama yang berbeda. Beberapa agama yang dianut oleh penduduk Desa Banjar Benai adalah:

1. Islam
2. Nasrani
3. Protestan
4. Budha

Untuk daftar Rumah Ibadah di Desa Banjar Benai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.4 Daftar Rumah Ibadah di Desa Banjar Benai

No	Rumah Ibadah	Jumlah (Gedung)
1	Masjid	3
2	Surau	10
3	Gereja	1
4	Vihara	-
Jumlah		14

Sumber: Desa Banjar Benai 2020

Dari tabel IV.4 diatas dapat kita ketahui bahwa keseluruhan rumah ibadah yang ada di Desa Banjar Benai adalah sebanyak 14 gedung. Dimana salah satunya adalah gedung Gereja yang terletak di kawasan Perusahaan karena rata-rata di kawasan tersebut di huni oleh penduduk yang beragama Kristen.

4.4 Kondisi Pemerintahan Desa

4.4.1 Pembagian Wilayah Desa

Dengan luas Desa Banjar Benai 27 ha ini terbagi menjadi dua wilayah yaitu wilayah yang dihuni oleh penduduk pribumi dan wilayah perusahaan yang dihuni oleh penduduk pendatang. Wilayah I terdiri dari 3 dusun:

- a. Dusun Hulu
- b. Dusun Sontul
- c. Dusun Kandis

Wilayah II terdiri dari 4 dusun:

- a. Dusun Harapan Jaya
- b. Dusun Bumi Putera
- c. Suka Maju
- d. Karya Murni

4.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas dan fungsi masing-masing Pemerintah Desa Banjar Benai Kecamatan Benai adalah

4.5.1 Kepala Desa

4.5.2 Sekretaris Desa

4.5.2.1 Tugas Sekretaris Desa

Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa, memberikan masukan kepada Kepala Desa dalam rangka menetapkan kebijakan pemerintahan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.5.2.2 Fungsi Sekretaris Desa

1. Mengoordinasikan tugas dan fungsi Kepala Urusan;
2. Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
3. Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,

pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;

4. Melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
5. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4.5.3 Kepala Urusan

4.5.3.1 Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

Tugas Kaur Umum dan Perencanaan adalah Membantu Sekretaris Desa dalam urusan Perencanaan, umum dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Fungsinya adalah menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan dan pelayanan umum.

4.5.3.2 Kepala Urusan Keuangan

Tugas Kaur Keuangan adalah membantu Sekretaris Desa dalam urusan keuangan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsi Kaur Keuangan adalah pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

4.5.4 Kepala Seksi

4.5.4.1 Kepala Seksi Pemerintahan

Tugas Kasi Pemerintahan adalah membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Fungsi Kasi Pemerintahan adalah melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, membantu Sekretaris Desa dalam menyusun rancangan produk-produk hukum di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan kewilayahan, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

4.5.4.2 Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

Tugas Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan adalah membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Fungsi Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan adalah melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang

budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

4.5.5 Kepala Dusun

Tugas Kepala Dusun adalah membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah dusun yang bersangkutan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Fungsinya Kepala Dusun adalah :

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah dusun yang bersangkutan;
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

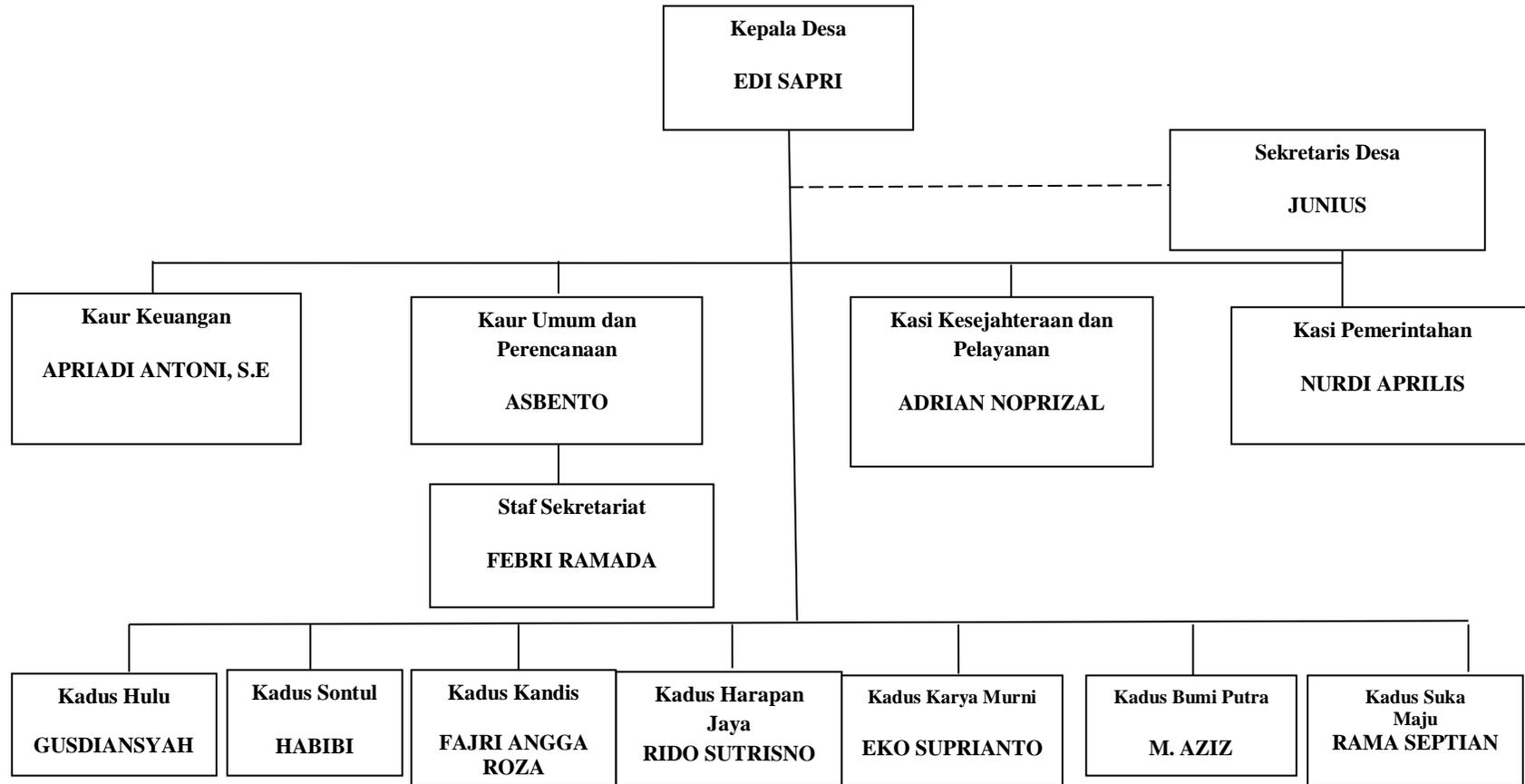
4.5.6 Staf Sekretariat

Tugas Staf Sekretariat adalah membantu Kepala Urusan Umum dan Perencanaan dalam menyusun perencanaan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Fungsinya adalah membantu Kepala Urusan Umum dan Perencanaan dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan dan pelayanan umum.

4.6 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber: Desa Banjar Benai 2020

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Setelah diadakan penelitian dan pengumpulan data dilapangan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara kepada responden, berikut di deskripsikan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat usia, pekerjaan dan pendidikan.

5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis kelamin.

Dari hasil penyebaran kuesioner dan hasil wawancara kepada responden, didapati jenis kelamin responden sebagai berikut:

Tabel V.1 Klasifikasi Responden menurut Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase %
1	Laki-laki	29	74.4%
2	Perempuan	10	25.6%
Jumlah		39	100%

Sumber : Modifikasi Peneliti 2020

Dari tabel V.1 diatas jumlah responden adalah sebanyak 39 orang dimana jumlah responden laki-laki adalah sebanyak 29 orang dengan persentase 74.45% dan jumlah responden perempuan sebanyak 10 orang dengan persentase 25.6%.

5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia

Dari hasil wawancara dan kuesioner yang telah peneliti lakukan di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi maka didapatkan hasil pengelompokan responden berdasarkan tingkat usia sebagai berikut:

Tabel V.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Usia

No	Rentang Usia	Jumlah (Orang)	Persentase
1	20-30 Tahun	13	33.3%
2	31-40 Tahun	15	38.5%
3	41-50 Tahun	6	15.4%
4	51-60 Tahun	5	12.8%
Jumlah		39	100%

Sumber: Modifikasi Peneliti 2020

Berdasarkan tabel V.2 diatas jumlah keseluruhan responden adalah sebanyak 39 orang. Dimana responden dengan rentang usia 31-40 tahun berjumlah 15 orang dengan persentase 38.5% merupakan responden terbanyak. Sedangkan responden dengan rentang usia 51-60 berjumlah 5 orang dengan persentase 12.8% adalah responden paling sedikit.

5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan dan Jabatan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi maka peneliti membagi responden berdasarkan pekerjaan masing-masing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan dan Jabatan

No	Jenis Pekerjaan Jabatan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Kepala Desa	1	2.7%
2	Sekretaris Desa	1	2.7%
3	Kepala Urusan	2	5.3%
4	Kepala Seksi	2	5.3%
5	Staff Sekretariat	1	2.7%
6	Kepala Dusun	7	18%
7	Petani/Pekebun	8	21.2%
8	Karyawan Swasta	3	7.9%

9	Wiraswasta	1	2.7%
10	Mahasiswa	2	5.3%
11	Ibu Rumah Tangga	6	15.5%
12	PNS/Guru	2	5.3%
13	Kuli Bangunan	1	2.7%
14	Sopir	1	2.7%
Jumlah		39	100%

Sumber: Modifikasi Peneliti 2020

Berdasarkan Tabel V.3 diatas jumlah keseluruhan responden adalah sebanyak 39 orang dengan jenis pekerjaan terbanyak adalah petani/pekebun dengan jumlah 8 orang dan persentase 21.2% dan jabatan yang paling banyak adalah Kepala Dusun yaitu sebanyak 7 orang dengan persentase 18%.

5.1.4 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Setelah peneliti melakukan wawancara dan kuesioner di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi maka peneliti dapat mengklasifikasikan responden berdasarkan tingkat pendidikannya. Untuk lebih memahami kalsifikasinya maka peneliti membuat dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel V.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
1	SD	9	23%
2	SMP	3	7.7%
3	SMA	21	53.9%
4	D3	1	2.6%
5	S1	5	12.8%
Jumlah		39	100%

Sumber: Modifikasi Peneliti 2020

Berdasarkan tabel V.4 diatas seluruh responden berjumlah 39 orang. Rata-rata responden dari penelitian ini adalah tamatan SMA yang berjumlah 21 orang dengan persentase 53%.

5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang Implementasi Sistem Informasi Desa di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam menentukan hasil dari setiap Indikator peneliti menggunakan tiga jenis ukuran penilaian yaitu Terimplementasi, Kurang Terimplementasi dan Belum terimplementasi.

5.2.1 Indikator Transparansi Anggaran Desa

Dengan adanya transparansi anggaran Desa maka masyarakat dapat mengetahui untuk apa saja anggaran Desa di buat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintah Desa. Adanya aplikasi anggaran Desa memudahkan Pemerintah dalam mempublikasikan anggaran Desa yang dibuat hanya dengan mengakses aplikasinya saja didukung dengan internet yang memadai. Instrumen pertanyaan untuk indikator Transparansi Anggaran Desa adalah:

5.2.1.1 Aplikasi Anggaran Desa

Setelah melakukan penelitian di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Peneliti mendapatkan hasil dari sebaran kuesioner atas pertanyaan Apakah Bapak/Ibu sudah Mengetahui bahwa Anggaran Desa Banjar Benai dapat di akses menggunakan Aplikasi Anggaran Desa di dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.5 Tanggapan Responden tentang Aplikasi Anggaran Desa

No	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	Sudah	8	32%
	Ragu-ragu	7	28%
	Belum	10	40%
		25	100%

Sumber: Data olahan 2020

Dari tabel V.5 diatas kita dapat melihat tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang Aplikasi Anggaran Desa dimana jumlah keseluruhan responden adalah 25 orang yang menjawab sudah tau ada sebanyak 8 responden (32%), yang menjawab ragu-ragu sebanyak 7 responden (28%) dan yang menjawab belum tau sebanyak 10 responden (40%). Maka dari hasil diatas dapat kita ketahui persentase jawaban yang terbanyak adalah tidak tau dengan persentase 40%. Jawaban responden tentang Aplikasi Anggaran Desa dapat di kategorikan Belum Terimplementasi.

Tidak hanya dengan kuesioner saja, peneliti juga menggali informasi dengan menggunakan metode wawancara kepada Kepala Desa beserta perangkatnya. Berdasarkan wawancara peneliti di lapangan dengan Bapak Edi Sapri selaku Kepala Desa Banjar Benai. Pertanyaan yang peneliti tanyakan yaitu apakah Bapak/Ibu sudah menggunakan Aplikasi Anggaran Desa. Berikut adalah kutipan wawancara peneliti.

“sudah, kami sudah mulai menggunakan Aplikasi Anggaran Dana Desa. Kami pun sudah mendapatkan pembekalan dari pemerintah Kecamatan bagaimana cara menggunakannya. Walaupun kami sering mengalami kesulitan, namun kami akan terus mempelajari bagaimana mengoperasikan Aplikasi tersebut. Untuk penggunaan internet kami sudah tidak menggunakan internet yang tersedia di Kantor Desa lagi. Dan sekarang untuk keperluan internet kami menggunakan internet

pribadi saja. (Edi Sapri, wawancara langsung 16 Maret 2020 09:00 WIB di Kantor Kepala Desa Banjar Benai)”.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Yunius selaku Sekretaris Desa mengenai penggunaan Aplikasi Anggaran Desa dalam membuat Anggaran Desa di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Berikut adalah kutipan wawancara peneliti.

“kalau soal Aplikasi Anggaran Desa saya belum bisa mengoperasikannya karena mungkin ini baru disampaikan oleh Kepala Desa kepada saya. Untuk membuat anggaran Desa kami masih manual seperti biasa karena kami masih butuh pembekalan tentang cara pengoperasiannya. Menurut saya lebih mudah dengan cara manual tanpa internet dalam membuat Anggaran Dana Desa ini. (Yunius, wawancara langsung, 17 Maret 2020 11.00 WIB di Kantor Kepala Desa Banjar benai)”.

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan Bapak Edi Sapri selaku Kepala Desa dan Bapak Yunius selaku Sekretris Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dapat diketahui bahwasanya anggaran dana Desa masih dibuat secara manual oleh perangkat desa dalam menganggarkan Anggaran Desa menggunakan internet pribadi masing-masing. Sedangkan penggunaan Aplikasi Anggaran Desa masih baru dalam pemerintahan Desa Banjar Benai dengan pembekalan yang masih minim sehingga pemerintah Desa Banjar Benai masih menggunakan cara manual tanpa internet.

Sedangkan hasil sebaran kuesioner peneliti terhadap masyarakat Desa Banjar Benai selaku responden adalah cukup terimplementasi dengan jumlah responden yang ragu-ragu sebanyak 10 responden (40%) dari keseluruhan responden yaitu sebanyak 25 responden.

Sesuai dengan hasil observasi peneliti dimana rata-rata masyarakat Desa Banjar Benai sudah mengetahui adanya sistem informasi desa di Desa Banjar Benai namun masih kurang peduli terhadap adanya inovasi dalam pelayanan desa yaitu adanya Aplikasi Anggaran Desa sehingga rata-rata masyarakat menjawab ragu-ragu apakah sudah pernah menggunakan Aplikasi Anggaran Desa tersebut.

5.2.1.2 Publikasi Anggaran Desa

Merupakan cara Pemerintah Desa dalam mewujudkan Transparansi Anggaran Desa sehingga tercipta kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dalam memimpin Desa tersebut. Publikasi Anggaran Desa menggunakan media internet sebagai alat untuk mempublikasikan anggaran tersebut kepada masyarakat. Dengan adanya internet maka sistem informasi desa akan semakin dilaksanakan.

Berikut tanggapan responden untuk pertanyaan item kedua indikator pertama yaitu dengan pertanyaan apakah sistem informasi desa didesa Banjar Benai sudah bermanfaat bagi Bapak/ibu untuk mengetahui Anggaran Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.6 Tanggapan Responden tentang Publikasi Anggaran Desa

No	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sudah	2	8%
2	Ragu-ragu	12	48%
3	Belum	11	44%
Jumlah		25	100%

Sumber: Data Olahan 2020

Dari tabel V.6 diatas dapat dilihat tanggapan responden yang menjawab Sudah sebanyak 2 responden (8%), menjawab Ragu-ragu sebanyak 12 responden (48%), dan menjawab Belum sebanyak 11 responden (44%). Maka dapat kita ketahui jawaban terbanyak adalah Ragu-ragu dimana jumlah responden yang menjawab 12 reponden dari total 25 responden dengan persentase sebesar 48%. Maka haasil dari kuesioner ini adalah Kurang Terimplementasi.

Informasi selanjutnya peneliti dapatkan melalui wawancara dengan Bapak Habibi selaku Kepala Dusun Sontul yaitu dengan pertanyaan Bagaimana Cara Bapak dalam Mempublikasikan Anggaran Desa kepada Masyarakat Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ini. Berikut adalah kutipan wawancara peneliti:

“cara kami selaku kepada dusun dalam mempublikasikan Anggaran Desa yaitu dengan mendirikan baliho di halaman kantor Kepala Desa yang berisi informasi mengenai rancangan Anggaran Desa. Selain itu kami juga diminta oleh Bapak Kepala Desa untuk mengupload Anggaran tersebut di media sosial resmi Desa Banjar Benai seperti grup Whatsapp, Facebook dan Instagram (Habibi, wawanca langsung, 16 Maret 2020 10.00 WIB di Kantor Kepala Desa Banjar Benai)”

Selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Asbento selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan mengenai Bagaimana Cara Bapak dalam mempulikasikan Anggaran Desa kepada Masyarakat. Berikut kutipan wawancara peneliti:

“untuk sekarang kami sistemnya masih manual dalam hal publikasi kepada masyarakat, seperti bisa adek lihat di halaman depan Kantor Kepala Desa ini terdapat Baliho yang menjelaskan tentang rincian anggaran Desa yang kami rancang. Kalau dari segi publikasi lewat internet saya kurang tau juga. Karena sekarang kami baru menggunakan whatsapp sebagai media berbagi informasi dengan

memanfaatkan internet, itu juga bukan internet dari Desa, kami menggunakan internet sendiri-sendiri (Asbento, wawancara langsung, 17 Maret 2020 09.00 WIB di Kantor Kepala Desa Banjar Benai)”

Dari kedua hasil wawancara dan observasi peneliti diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa publikasi anggaran desa di Desa Banjar Benai masih belum menggunakan Intenet melainkan hanya dengan metode manual seperti pemberitahuan lewat spanduk atau Baliho. Sejalan dengan pengamatan peneliti di lapangan memang benar publikasi anggaran desa di Desa Banjar Benai masih belum menggunakan internet sebagai alat sistem informasi desa. Maka dapat kita simpulkan bahwa Publikasi Anggaran Desa di Desa Banjar Benai belum terimplementasi.

Dari Hasil Kuesioner didapat jawaban Kurang Terimplementasi sedangkan dari hasil wawancara didapat jawaban Belum Terimplementasi. Melalui observasi yang peneliti lakukan di lapangan terlihat bahwa internet Desa tidak digunakan oleh Perangkat Desa dalam segi publikasi anggaran Desa melainkan hanya menggunakan cara Publikasi melalui Spanduk atau Baliho dan masyarakat pun tidak seluruhnya tergabung dalam grup *whatsapp* yang digunakan Pemerintah Desa dalam mempublikasikan Anggaran Desa secara Online. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Publikasi Anggaran Desa di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Kurang Terimplementasi.

5.2.1.3 Rekapitulasi Jawaban Indikator Pertama

Setelah mendapatkan jawaban dari sebaran kuesioner untuk kedua pertanyaan dari indikator pertama, maka hasil rekapitulasi jawaban kuesioner indikator pertama sebagai berikut:

Tabel V.7 Hasil Rekapitulasi Jawaban dari Pertanyaan Pertama dan Kedua Indikator Pertama

Kategori Jawaban	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Jumlah	persentase
Sudah	8	2	10	20%
Ragu-ragu	10	12	22	44%
Belum	7	11	18	36%
Jumlah	25	25	50	100%

Sumber: Data Olahan 2020

Dari tabel V.7 diatas maka dapat kita lihat nilai persentase tertinggi yaitu kategori jawaban Ragu-ragu dengan persentase 44%. Rata-rata responden menjawab ragu-ragu untuk indikator pertama karena banyak yang belum paham mengenai anggaran Desa sehingga mereka memilih ragu-ragu sebagai jawabannya.

Sedangkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan untuk pertanyaan pertama dan kedua indikator pertama informan menjawab bahwa penyusunan anggaran dana desa belum memanfaatkan internet sebagai medianya. Rata-rata informan menjawab bahwa sistem informasi desa didesa Banjar Benai belum terlaksana dengan baik.

Sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan di lapangan. Peneliti melihat di dalam kantor desa sudah tidak tersedia lagi internet gratis bagi masyarakat maupun pemerintah desa itu sendiri. Peneliti juga mencoba mencari hotspot atas nama kantor desa melalui *smartphone* dan tidak lagi menemukannya. Anggaran dana desa belum memanfaatkan internet dalam penyusunannya dikarenakan pemerintah desa tidak memiliki akses internet lagi. Dan pemerintah

enggan mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk mengaktifkan kembali program internet ini.

Maka didapatlah hasil dari pertanyaan indikator pertama yaitu Belum Terimplementasi.

5.2.2 Indikator Sistem Informasi Desa

Sistem Informasi Desa yang diakses melalui online merupakan inovasi pelayanan yang dapat memperpendek jarak antara pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah. Dengan adanya Sistem Informasi berbasis internet ini maka Pemerintah Daerah maupun masyarakat dapat mengakses informasi Desa mana saja di daerahnya sesuai dengan Kebutuhan. Instrumen pertanyaan untuk indikator Sistem Informasi Desa adalah:

5.2.2.1 Dapat di Akses oleh Pemerintah Daerah Secara Online

Berikut tanggapan responden terhadap item pertama indikator kedua dengan pertanyaan yaitu Apakah Bapak/Ibu pernah menggunakan Internet di Kantor Desa Banjar Benai sebagai alat sistem informasi desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.8 Tanggapan Responden tentang Penggunaan Internet untuk Melihat Informasi Desa ataupun Daerah

No	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sering	6	24%
2	Sekali-sekali	11	44%
3	Tidak Pernah	8	32%
Jumlah		25	100%

Sumber: Data Olahan 2020

Dari tabel V.8 diatas dapat kita lihat responden yang menjawab Sering berjumlah 6 responden dengan persentase 24%, menjawab Sekali-sekali

berjumlah 11 responden dengan persentase 44% dan menjawab tidak pernah berjumlah 8 responden dengan persentase 32%. Maka jawaban terbanyak dari 25 responden yang telah peneliti beri kuesioner adalah Sekali-sekali dengan jumlah 11 responden atau 44%. Maka di dapatkan jawaban dari pertanyaan pertama indikator kedua ini yaitu Kurang Terimplementasi.

Menurut observasi peneliti di lapangan, masyarakat Desa Banjar Benai sudah banyak yang mengetahui adanya Internet yang tersedia di kantor Desa, namun mereka masih belum memanfaatkannya untuk melihat informasi Desa maupun daerah melainkan hanya memanfaatkan Internet untuk sosial Media dan lainnya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Edi Sapri selaku Kepala Banjar Benai dengan Pertanyaan Apakah Informasi Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ini Sudah Dapat Diakses oleh Pemerintah Daerah secara Online. Berikut kutipan wawancara peneliti.

“informasi Desa belum bisa diakses secara online karena Desa Banjar Benai ini belum memiliki website Desa yang memuat tentang informasi Desa sehingga semua orang bisa mengaksesnya. Kendalanya yaitu minimnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam hal internet itu. Kami sangat berharap Sistem Informasi Desa dapat berjalan secara online. Pernah kemaren pihak Pt. Icon Plus menjanjikan akan membuat website Desa secara gratis, namun sampai sekarang janji itu tidak pernah ditepati yang membuat kami pun tidak melanjutkan pembayaran Internet tersebut. Dan kemudian pihak Pt. Icon Plus pun memutuskan layanan internet ke Desa Ini. (Edi Sapri, wawancara langsung, 16 Maret 2020 09.20 WIB di Kantor Kepala Desa Banjar Benai)”

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Banjar Benai Sistem Informasi Desa Banjar Benai belum dapat diakses secara *online*

karena minimnya pengetahuan Perangkat Desa tentang cara mengoperasikan internet

5.2.2.2 Media Informasi Resmi Menggunakan Website

Internet dapat digunakan oleh Pemerintah dalam memberikan media informasi resmi bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak mudah untuk percaya dengan berita-berita yang belum diketahui kebenarannya atau biasa disebut *hoax*. Untuk itu Pemerintah memerlukan jaringan internet untuk dapat membuat website dalam memberikan informasi resmi bagi masyarakat.

Berikut hasil sebaran kuesioner peneliti tentang Apakah Desa Banjar Benai sudah memiliki website Desa sebagai media informasi resmi yang bisa diakses oleh semua masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.9 Tanggapan Responden tentang Website Desa yang dapat diakses oleh Masyarakat.

No	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sudah	0	0%
2	Ragu-ragu	9	36%
3	Belum	16	64%
Jumlah		25	100%

Sumber: Data Olahan 2020

Menurut tabel V.9 diatas maka dapat diketahui hasil dari sebaran kuesioner peneliti terhadap masyarakat selaku responden tentang tersedianya website Desa yang dapat di akses oleh masyarakat adalah masyarakat menjawab belum tersedia, dengan hasil jawaban responden sebanyak 16 responden menjawab belum dengan persentase 64% menjawab ragu-ragu sebanyak 9 responden dengan persentase 36% dan tidak ada responden yang menjawab

sudah. Maka dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa belum tersedia website desa yang bisa diakses oleh masyarakat.

Sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan di lapangan yaitu dengan mencoba mencari website Desa Banjar Benai di internet dan peneliti belum menemukan website resmi Desa Banjar Benai yang bisa diakses oleh peneliti maupun masyarakat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Febri Ramada selaku Staf Sekretariat Kantor Kepala Desa Banjar Benai dengan pertanyaan Apakah Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ini sudah memiliki Website Desa sebagai media informasi resmi yang bisa diakses oleh semua orang. Berikut kutipan wawancara peneliti.

“untuk website desa Banjar Benai belum ada, namun mengenai media informasi desa kami selaku perangkat desa hanya menyediakan informasi di kantor kepala desa, jadi jika ada masyarakat yang ingin mengetahui informasi terbaru tentang desa Banjar Benai silahkan datang ke Kantor Kepala Desa karena untuk pembuatan website itu kami masih dalam proses karena banyak yang harus diisi dalam pembuatan website tersebut. Sedangkan data informasi desa sudah banyak yang hilang karena seiring dengan pergantian posisi Kepala Desa yang lama ke yang baru karena dulu setiap informasi desa disimpan di rumah Kepala Desa itu sendiri, bukan di Kantor jadi agak sulit untuk merangkap semua informasi desa itu. Namun kami baru memiliki media sosial di instagram tentang Desa Banjar Benai yang baru dibuat untuk memberikan informasi terbaru tentang Desa Banjar Benai.(Febri Ramada, dan wawancara langsung 17 Maret 2020 10:00 WIB di Kantor Kepala Desa Banjar Benai)”

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Febri Ramada selaku Staf Sekretariat Desa Banjar Benai maka diketahui bahwa Desa Banjar Benai belum

memiliki website desa yang dapat di akses oleh semua orang. Dikarenakan berbagai hambatan dalam pembuatan website tersebut. Sejalan dengan observasi peneliti bahwa Desa Banjar Benai belum memiliki website Resmi Desa yang dapat diakses oleh semua orang.

5.2.2.3 Rekapitulasi Jawaban Indikator Kedua

Setelah mendapatkan jawaban dari sebaran kuesioner untuk kedua pertanyaan dari indikator kedua, maka hasil rekapitulasi jawaban kuesioner indikator kedua sebagai berikut:

Tabel V.10 Hasil Rekapitulasi Jawaban dari Pertanyaan Pertama dan Kedua Indikator Kedua

Kategori Jawaban	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Jumlah	persentase
Sering/Sudah	6	0	6	12%
Sekali-sekali/Ragu-ragu	11	9	20	40%
Tidak Pernah/Belum	8	16	24	48%
Jumlah	25	25	50	100%

Sumber: Data Olahan 2020

Dari tabel V.10 diatas maka dapat kita ketahui rekapitulasi jawaban masyarakat terhadap pertanyaan dari indikator kedua. Yang mana pertanyaan yang peneliti ajukan adalah mengenai penggunaan internet desa untuk melihat informasi Pemerintah Desa maupun Daerah dan mengenai Website Desa yang di buat untuk diakses masyarakat sebagai media informasi Desa. Maka di dapat jawaban terbanyak dari kedua pertanyaan tersebut adalah sekali-sekali atau ragu-ragu dengan persentase 48% .

Hasil dari wawancara peneliti terkait kedua pertanyaan dari indikator kedua bersama Perangkat Desa adalah bahwa sistem informasi desa belum bisa

diakses secara online dengan memanfaatkan media internet desa karena berbagai faktor salah satunya program internet desa yang sudah tidak berjalan lagi dan Pemerintah Desa yang belum mampu menciptakan website desa sebagai pusat informasi desa berbasis online karena tidak *valid* nya data profil Desa dan kemampuan Perangkat Desa dalam pengelolaan website ini. Untuk penyediaan informasi Desa, Pemerintah Desa hanya melayani secara *offline* atau dengan spanduk dan baliho yang sudah di pasang di halaman Kantor Desa.

Sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan, Perangkat Desa memang sudah memenuhi kewajibannya dalam menyediakan informasi Desa. Akan tetapi itu hanya dilakukan secara manual sehingga informasi tersebut hanya bisa dilihat oleh masyarakat yang melintas atau mengunjungi kantor Desa. Sedangkan masyarakat yang berada di luar wilayah Desa Banjar Benai tidak dapat mengetahuinya karena belum ada Informasi Desa yang dapat diakses melalui internet. Untuk itu maka dapat peneliti simpulkan bahwa hasil dari Pertanyaan Indikator Kedua Belum Terimplementasi.

5.2.3 Indikator Media Komunikasi Desa

Media komunikasi Desa diperlukan masyarakat untuk lebih dekat dengan Pemerintah Desa sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Desa. Disamping itu dengan adanya media komunikasi Desa Pemerintah Desa pun pasti akan merasa terbantu dalam segi waktu dan tenaga. Tidak perlu lagi mendatangi masyarakat satu-satu dan menanyakan aspirasi mereka. Cukup dengan memanfaatkan internet dan masyarakat dapat langsung berkomentar di halaman website Desa

5.2.3.1 Penyampaian Aspirasi Masyarakat

Berikut adalah hasil dari sebaran kuesioner yang peneliti lakukan dengan pertanyaan Apakah Bapak/ibu pernah menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Desa dengan menggunakan Internet sebagai media komunikasi Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.11 Tanggapan Responden tentang Akses internet dalam penyampaian aspirasi

No	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Pernah	10	40%
2	Ragu-ragu	2	8%
3	Sudah Pernah	13	52%
Jumlah		25	100%

Sumber: Data Olahan 2020

Sesuai dengan tabel V.11 diatas maka dapat kita ketahui bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan peneliti yang paling banyak adalah sudah pernah dengan jumlah responden yang menjawab yaitu 13 orang dengan persentase 52%. Tidak jauh selisish jumlah jawaban pernah dan tidak pernah yaitu hanya selisih 3 orang. Responden yang menjawab pernah sebanyak 10 orang dengan persentase 40%. Responden yang menjawab tidak pernah rata-rata adalah responden yang berusia 40 tahun keatas karena rata-rata responden dengan usia tersebut tidak bisa menggunakan internet. Sedangkan yang yang menjawab pernah adalah responden yang berusia 30 tahun kebawah dimana mereka sehari-hari sudah menggunakan internet sebagai media komunikasi termasuk dalam hal menyampaikan aspirasi mereka terhadap Pemerintah Desa.

Setelah mendapatkan hasil dari sebaran kuesioner untuk pertanyaan pertama indikator ketiga ini, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan

Bapak Edi Sapri selaku Kepala Desa Banjar Benai dengan pertanyaan apakah masyarakat Desa Banjar Benai sudah menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah Desa dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi Desa. Berikut kutipan wawancara peneliti.

“sudah, masyarakat sudah pernah menyampaikan aspirasinya kepada kami melalui media internet yaitu dengan menggunakan aplikasi whatsapp. Namun itupun tidak banyak dari masyarakat yang menggunakan media online untuk menyampaikan aspirasinya. Masyarakat lebih suka menyampaikan secara langsung kepada saya apa yang menjadi keluhan mereka seperti contohnya para ibu-ibu yang bertani disawah dan tanaman padi mereka dirusak oleh ternak warga dan mereka langsung mengadu ke Kantor Desa, tidak melalui media sosial karna kebiasaan kita dikampung ini. Mereka tidak terbiasa berkomunikasi secara online. (Edi Sapri, wawancara langsung, 16 maret 2020 09.30 WIB dikantor Kepala Desa Banjar Benai)”

Berdasarkan kutipan wawancara yang peneliti lakukan bersama Bapak Edi Sapri selaku Kepala Desa diatas, maka dapat kita ketahui bahwa masyarakat sudah pernah menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah Desa dengan menggunakan media internet yaitu salah satunya menggunakan aplikasi *whatsapp*. Akan tetapi masyarakat belum terbiasa dengan adanya internet sebagai media Komunikasi Desa karena faktor kebiasaan yang ada dilingkungan masyarakat desa yang terbiasa bertemu langsung untuk saling berkomunikasi.

Setelah peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Kepala Desa, peneliti pun melakukan pengamatan secara langsung apakah Media Komunikasi Desa dengan menggunakan internet sudah terlaksana didesa Banjar Benai ini atau belum. Dan hasil dari pengamatan peneliti bahwa sudah ada sebagian masyarakat yang menggunakan internet untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah Desa.

5.2.3.2 Media Kampanye Pemerintah

Berikut adalah hasil dari sebaran kuesioner untuk pernyataan kedua dari indikator ketiga dengan pertanyaan apakah pemerintah Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan internet untuk berkampanye secara nasional seperti program Keluarga Berencana, Sensus Penduduk Online 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.12 Tanggapan Responden tentang pemanfaatan Internet oleh pemerintah Desa dalam Berkampanye secara Nasional

No	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Iya	9	36%
2	Ragu-ragu	5	20%
3	Tidak	11	44%
Jumlah		25	100%

Sumber: Data Olahan 2020

Sesuai dengan tabel V.12 diatas maka dapat kita ketahui bahwa jawaban terbanyak dari 25 orang responden adalah tidak yaitu sebanyak 11 orang dengan persentase 44%. Jawaban terbanyak kedua adalah iya dengan jumlah responden yang menjawab adalah 9 orang dengan persentase 36%. Dilihat dari jumlah persentase didalam tabel diatas maka dapat kita ketahui jawabannya adalah tidak. Setelah peneliti lakukan pengamatan secara langsung terhadap responden yang menjawab tidak, rata-rata responden tersebut mengaku belum pernah melihat Pemerintah Desa berkampanye secara online. Pemerintah Desa selalu Berkampanye dengan cara bersosialisasi dengan masyarakat secara langsung tanpa bantuan internet.

Setelah melakukan kuesioner terhadap masyarakat, peneliti pun melanjutkan wawancara dengan Bapak Edi Sapri selaku Kepala Desa Banjar

Benai dengan pertanyaan Apakah Pemerintah Desa Banjar Benai menggunakan internet untuk membantu Pemerintah Desa berkampanye secara nasional seperti program Keluarga Berencana atau Sensus Penduduk Online 2020. Berikut kutipan wawancara peneliti.

“Belum, kami belum menggunakan media internet untuk melakukan kampanye terhadap masyarakat. Karena kami belum memiliki wadah untuk menyampaikan kampanye-kampanye nasional iniseperti misalkan dengan adanya website desa, kami bias berkampanye apasaja disitu, namun karena keterbatasan sumber daya membuat kami belum bisa melakukan kampanye tersebut. Kami hanya memiliki grup whatsaap yang bias digunakan untuk berkampanye dan orang yang melihatnya pun hanya terbatas anggota grup saja, tidak semua orang bisa melihatnya. (Edi Sapri, wawancara langsung, 16 Maret 2020 09.40 WIB dikantor Kepala Desa Banjar Benai)”

Dari hasil kutipan wawancara diatas yang peneliti lakukan dengan Bapak Edi Sapri selaku Kepala Desa Banjar Benai maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa belum menggunakan internet dalam berkampanye secara nasional. Karena faktor sumber daya manusia yang kurang memadai dalam pembuatan wadah atau forum untuk melakukan kampanye secara online tersebut.

5.2.3.3 Rekapitulasi Jawaban Indikator Ketiga

Setelah mendapatkan jawaban dari sebaran kuesioner untuk kedua pertanyaan dari indikator ketiga, maka hasil rekapitulasi jawaban kuesioner indikator ketiga sebagai berikut:

Tabel V.13 Hasil Rekapitulasi Jawaban dari Pertanyaan Pertama dan Kedua Indikator Ketiga

Kategori jawaban	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Jumlah	Persentase
Pernah/Iya	10	9	19	38%
Ragu-ragu	2	5	7	14%
Tidak pernah/Tidak	13	11	24	48%
Jumlah	25	25	50	100%

Sumber: Data Olahan 2020

Dari tabel V.13 diatas dapat kita ketahui bahwa jawaban dengan dengan persentase tertinggi adalah tidak pernah atau tidak dengan jumlah responden yang memilih adalah sebanyak 24 orang dengan persentase 48%. Sesuai dengan hasil jawaban responden tersebut maka dapat peneliti responden simpulkan bahwa hasil dari sebaran kuesioner untuk indikator ketiga adalah belum terimplementasi.

Selanjutnya peneliti menganalisa hasil dari kedua jawaban wawancara yang peneliti lakukan dengan Perangkat Desa terkait dengan pertanyaan dari indikator ketiga. Hasil dari wawancara jawaban pertama adalah sudah terimplementasi dimana sudah ada sebagian masyarakat yang menggunakan internet dalam menyampaikan aspirasinya terhadap Pemerintah Desa.

Sedangkan untuk hasil wawancara dari pertanyaan kedua adalah belum terimplementasi karena menurut jawaban Perangkat Desa kepada peneliti bahwa Pemerintah Desa belum menggunakan media internet sebagai media komunikasi dalam hal berkampanye secara nasional karena Pemerintah Desa memiliki keterbatasan dalam pengelolaan halaman web Desa disebabkan oleh berbagai faktor.

Selanjutnya peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk melihat apakah indikator media komunikasi desa sudah terimplementasi. Setelah peneliti melakukan pengamatan mengenai indikator media komunikasi desa, peneliti melihat bahwa Pemerintah Desa belum melaksanakan komunikasi desa dengan menggunakan internet, baik dalam hal penyampaian aspirasi masyarakat maupun dalam hal kampanye secara online. Untuk itu dapat peneliti simpulkan bahwa dari jawaban indicator ketiga yaitu media komunikasi desa adalah belum terimplementasi.

5.2.4 Indikator Media Promosi

Media promosi merupakan indikator terakhir yang harus tercapai dalam implementasi Internet Desa pintar di Desa Banjar Benai ini karena pada zaman serba digital saat ini sudah banyak masyarakat yang memilih untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari dengan memanfaatkan jasa digital seperti dengan adanya aplikasi-aplikasi angkutan yang menawarkan jasa antar jemput alamat yang sangat memudahkan kita dalam segala kegiatan transportasi. Untuk itu dengan adanya Internet Desa yang tersedia dikantor Kepala Desa seharusnya dapat kita manfaatkan juga untuk mempromosikan potensi-potensi desa kepada orang luar. Karena dengan menggunakan internet target promosi desa itu tidak terbatas dan dapat dilihat oleh masyarakat manapun.

5.2.4.1 Pemasaran Produk Khas Desa

Berikut adalah hasil dari sebaran kuesioner yang peneliti lakukan terhadap masyarakat Banjar Benai dengan pertanyaan adakah produk-produk khas Banjar Benai yang sudah dipromosikan dan dipasarkan secara online dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.14 Tanggapan Responden tentang Produk Khas Desa yang di Promosikan dan di Pasarkan Secara Online

No	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Ada	10	40%
2	Ragu-ragu	11	44%
3	Tidak Pernah	4	16%
Jumlah		25	100%

Sumber: Data Olahan 2020

Sesuai dengan tabel V.14 diatas maka dapat kita lihat hasil dari sebaran kuesioner untuk pertanyaan pertama indikator keempat dimana jawaban terbanyak adalah ragu-ragu dengan persentase 44%. Akan tetapi jawaban ragu-ragu hanya selisih sedikit dengan jawaban Ada. Karena sebagian dari responden yang menjawab ada mengetahui bahwa ada produk produk khas Desa yang telah dipasarkan secara online yaitu produk pupuk kompos yang sudah dipasarkan melalui media sosial. Produk ini dipilih oleh masyarakat karena melihat mayoritas penduduk Desa Banjar Benai memiliki ternak da nada beberapa kelompok tani yang mendapatkan bantuan ternak. Sehingga limbah kotoran sapi yang menumpuk dapat diolah menjadi pupuk kompos dan dipasarkan secara online oleh masyarakat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terkait promosi produk khas Desa ini bersama Bapak Edi Sapri selaku Kepala Desa Banjar Benai dengan

pertanyaan Apa saja produk Khas Desa Banjar Benai yang sudah dipromosikan secara online. Berikut kutipan wawancara peneliti.

“baru satu produk yang berhasil dipasarkan oleh masyarakat kita secara online yaitu pupuk kompos. Dimana pupuk ini diolah oleh kelompok tani yang memiliki ternak sapi bantuan dari RAPP dan Pemerintah Pusat. Sapi-sapi ini tidak dilepas untuk mencari makan sendiri seperti ternak sapi warga, melainkan sapi-sapi ini dirawat didalam kandang saja sehingga limbah kotorannya menumpuk dan kelompok tani tersebut pun mendapat ide untuk mengolahnya menjadi pupuk organik yang dipasarkan seperti sekarang ini. Untuk media promosi secara online, kami baru menggunakan media sosial seperti facebook dan whatsapp. (Edi Sapri, wawancara langsung, 16 Maret 2020 09.40 WIB di Kantor Kepala Desa Banjar Benai)”

Dapat kita lihat hasil dari kutipan wawancara yang peneliti lakukan bersama Bapak Kepala Desa Banjar Benai diatas bahwa Desa Banjar Benai sudah memiliki produk khas Desa yang dipasarkan secara online yaitu pupuk organik dari limbah kotoran sapi. Produk ini sudah dipasarkan melalui *facebook* dan *whatsapp*.

Setelah peneliti menyebarkan kuesioner terhadap masyarakat dan melakukan wawancara bersama perangkat Desa mengenai pertanyaan pertama indikator keempat ini, maka peneliti juga melakukan observasi atau pengamatan secara langsung dilapangan dan setelah peneliti lihat Desa Banjar Benai memang benar sudah memiliki khas Desa yang sudah dipasarkan secara online yaitu media *facebook*. Untuk itu dapat kita simpulkan bahwa jawaban dari pertanyaan pertama indikator keempat adalah sudah terimplementasi.

5.2.4.2 Promosi Potensi Desa dengan Media Sosial

Berikut adalah hasil dari sebaran kuesioner yang peneliti lakukan terhadap masyarakat Banjar Benai dengan pertanyaan menurut Bapak/Ibu apakah sudah ada potensi Desa Banjar Benai yang sudah dipromosikan di media sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.15 Tanggapan Responden tentang Potensi Desa yang Sudah di promosikan di Media Sosial

No	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Ada	7	28%
2	Ragu-ragu	10	40%
3	Tidak ada	8	8%
Jumlah		25	100%

Sumber: Data Olahan 2020

Dari tabel V.15 diatas dapat kita ketahui jawaban terbanyak dari pertanyaan tentang Potensi Desa Banjar Benai adalah ragu-ragu dimana jumlah responden yang menjawab adalah 10 orang dengan persentase 40%. Rata-rata responden menjawab ragu-ragu karena mereka merasa ada potensi desa yang sudah dipromosikan secara online namun masih belum yakin akan jawabannya tersebut sehingga mereka memilih ragu-ragu sehingga di dapat jawaban dari sebaran kuesioner untuk pertanyaan kedua indikator keempat adalah kurang terimplementasi.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Edi Sapri selaku Kepala Desa Banjar Benai mengenai pertanyaan kedua ini dengan pertanyaan adakah potensi Desa Banjar Benai yang sudah di promosikan di Media Sosial berikut kutipan wawancara peneliti.

“belum, untuk sekarang belum ada kami lihat potensi Desa Banjar Benai baik itu dari segi Alam, Industri, Wisata dan lain sebagainya. Akan tetapi kami akan terus menggali potensi Desa Banjar Benai agar dapat bersaing dengan desa-desa lain, jika potensi alamnya tidak ada yang dapat dipromosikan. Mungkin kami akan membuat produk-produk dari hasil kebun atau ataupun kami akan membuat kebun buah dan sayur atau agrofarm dan akan kami promosikan secara online. (Edi Sapri, wawancara langsung, 16 Maret 2020 09.50 WIB di Kantor Kepala Desa Banjar Benai)”

Dari hasil wawancara peneliti bersama Bapak Edi Sapri di atas maka dapat kita ketahui bahwa belum ada potensi Desa Banjar Benai yang sudah dipromosikan secara online karena menurut perangkat Desa terkait bahwa potensi Desa ini belum menemukan apa potensi Desa yang cocok untuk dikembangkan di Desa Banjar Benai ini sehingga dapat disimpulkan hasil wawancara pertanyaan kedua indikator keempat ini adalah belum terimplementasi.

Selanjutnya peneliti melakukan observasi di Desa Banjar Benai dan melihat-lihat secara langsung adakah potensi Desa Banjar Benai yang dapat dipromosikan di media sosial dan hasilnya tidak ada potensi apapun baik itu potensi alam, usaha atau industri, maupun potensi wisata di Desa tersebut. Untuk itu peneliti menyimpulkan bahwa hasil dari pertanyaan kedua indikator keempat ini belum terimplementasi.

5.2.4.3 Rekapitulasi Jawaban Indikator Keempat

Setelah mendapatkan jawaban dari sebaran kuesioner untuk kedua pertanyaan dari indikator ketiga, maka hasil rekapitulasi jawaban kuesioner indikator ketiga sebagai berikut:

Tabel V.16 Hasil Rekapitulasi Jawaban dari Pertanyaan Pertama dan Kedua Indikator Keempat

Kategori jawaban	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Jumlah	Persentase
Ada	10	7	17	34%
Ragu-ragu	11	10	21	42%
Tidak ada	4	8	12	24%
Jumlah	25	25	50	100%

Sumber: Data Olahan 2020

Dari tabel V.16 diatas maka dapat kita ketahui jawaban terbanyak adalah ragu-ragu dengan jumlah 21 orang dengan persentase 42%. Dari pertanyaan pertama dan kedua rata-rata responden menjawab ragu-ragu karena mereka merasa kurang mengetahui tentang produk khas desa maupun potensi Desa Banjar Benai yang peneliti tanyakan sehingga mereka memilih untuk menjawab ragu-ragu. Oleh karena itu, maka di dapat hasil dari kuesioner indikator keempat adalah cukup terimplementasi.

Setelah itu peneliti akan lanjutkan dengan rekapitulasi wawancara pertanyaan pertama dan kedua dari indikator keempat ini dimana jawaban dari pertanyaan pertama bersama Bapak Kepala Desa yaitu tentang produk khas desa yang dipasarkan secara online itu sudah terimplementasi karena memang sudah ada produk khas desa yang sudah dipasarkan melalui media internet.

Sedangkan untuk jawaban dari pertanyaan kedua hasil wawancaranya yaitu belum terimplementasi karena menurut Bapak Kepala Desa belum ada potensi desa yang bisa dikembangkan dan dipasarkan melalui media sosial baik itu dari segi alam, industri maupun wisata. Setelah peneliti lakukan observasi

dilapangan peneliti melihat produk khas desa yang sudah dipasarkan secara online tersebut bisa di jadikan potensi desa yang harus dikembangkan untuk potensi desa tersebut. Untuk itu maka peneliti menyimpulkan bahwa hasil dari wawancara indikator keempat adalah sudah terimplementasi.

Selanjutnya karena terdapat dua jawaban berbeda dalam indikator keempat ini yaitu jawaban kuesioner adalah cukup terimplementasi dan jawaban wawancara adalah sudah terimplementasi. Peneliti memilih jawaban untuk indikator keempat ini adalah sudah terimplementasi karena sesuai dengan yang peneliti jelaskan diatas bahwa sudah ada produk khas desa yang di pasarkan melalui media social. Maka didapat hasil dari pertanyaan indikator keempat adalah sudah terimplementasi.

5.2.5 Rekapitulasi Indikator Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat.

Setelah mendapatkan jawaban dari keempat indikator, maka peneliti mengolah data tersebut sehingga didapat hasil akhir dari penelitian ini yaitu rekapitulasi jawaban indikator pertama, kedua, ketiga, dan keempat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.17 Hasil Rekapitulassi Jawaban dari Pertanyaan Indikator Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat.

Indikator	Item	Hasil Akhir	Persentase
indikator pertama	transparansi anggaran desa	cukup terimplementasi	25%
indikator kedua	sistem informasi desa	belum terimplementasi	25%
indikator ketiga	media komunikasi	belum	25%

	desa	terimplementasi	
indikator keempat	media promosi	belum terimplementasi	25%
Jumlah			100%

Sumber: Data Olahan 2020

Dari tabel V.17 diatas dapat kita ketahui hasil rekapitulasi jawaban kuesioner dari keempat indikator adalah belum terimplementasi dengan persentase 75% dari keseluruhan indikator yaitu tiga indikator hasilnya adalah belum terimplementasi dan satu indicator sudah terimplementasi. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hasil dari kuesioner dan wawancara implementasi sistem informasi desa di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi belum terimplementasi.

Dengan adanya informasi Desa yang dapat di akses melalui internet maka setiap orang bukan hanya dari Desa Banjar Benai saja tapi dari seluruh daerah dapat mengaksesnya dan akan dapat memberi kemudahan bagi desa Banjar Benai dalam mempromosikan Desanya dan akan memudahkan bagi orang luar untuk mengakses Desa Banjar Benai. Akan tetapi hal tersebut diatas belum di bentuk oleh Pemerintah Desa Banjar Benai sehingga implementasi sistem informasi desa di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi belum terimplementasi.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai Implementasi Sistem Informasi Desa di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Belum Terimplementasi.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan pertimbangan agar Implementasi Sistem Informasi Desa di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dapat terimplementasi dengan baik. Adapun saran-saran tersebut adalah:

- 6.2.1 Pemerintah Desa Banjar Benai melibatkan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang professional dan berkomitmen dalam menyediakan internet desa.
- 6.2.2 Pemerintah Desa Banjar Benai memilih layanan internet dengan harga yang ekonomis sehingga dapat menghemat anggaran pengeluaran Desa.
- 6.2.3 Pemerintahh Desa Banjar Benai sebaiknya membuat Halaman Website Desa dengan melibatkan masyarakat yang paham tentang program teknologi komunikasi dan informasi sehingga tercipta halaman web desa

yang menyajikan informasi Desa kepada seluruh pengunjung Website Desa Banjar Benai.

- 6.2.4 Pemerintah Desa melakukan pendataan terbaru di Desa Banjar Benai guna mengisi data informasi Desa di halaman Web sehingga kendala dalam kehilangan data sebelumnya dapat teratasi.
- 6.3.5 Pemerintah Desa Banjar Benai di harapkan mensosialisasikan pemanfaatan internet sebagai media informasi Desa kepada masyarakat Desa yang mayoritas sudah menggunakan internet dalam kehidupan sehari-harinya.
- 6.2.6 Pemerintah Desa Banjar Benai harus teliti dalam menggali potensi Desa yang bisa di promosikan melalui internet sehingga dapat mendukung kemajuan desa Banjar Benai itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Wahab, Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan dari formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abidin, Said Zainal, 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media : Yogyakarta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Dunn, W. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta .
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok : Rajawali Pers.
- Huda, Ni'matul. 2011. *Ilmu Negara*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Indiahono, Diyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Siagian, Sondang P, 2001. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi, dan Strategi*. Jakarta : Bina Aksara.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Simamora, Hendry. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi 2. STIE YKPN: Yogyakarta

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.

Suharto, Edi. 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Sutrisno, Edy. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana: Jakarta

Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama

Syaukani, dkk. 2003, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widodo, 2010, *Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Banyumedia.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab IX tentang “Sistem informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan” pasal 86

C. INTERNET

<http://www.berazam.com/read-507-12070-2019-06-16-internet-desa-bermasalah-kontrak-icon--masih-berjalan-datang-perusahaan-nig-tawarkan-jasa-aplikasi-digital.html> diakses pada jam 22:34WIB tanggal 19 november 2019

<https://ubiqu.id/blog/kenapa-desa-butuh-internet/> diakses pada jam 11:20 WIB tanggal 06 desember 2019

DAFTAR WAWANCARA

A. IDENTITAS PENELITIAN

1. Nama : Kurnia Permadani
2. NPM : 160411054
3. Program Studi : Administrasi Negara
4. Fakultas : Ilmu Sosial
5. Universitas : Universitas Islam Kuantan Singingi
6. Semester : VIII (Delapan)
7. Alamat : Banjar Benai
8. No. Hp : 081270248877
9. Judul Penelitian : Implementasi Program Internet Desa Pintar
di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai
Kabupaten Kuantan Singingi.

B. IDENTITAS RESPONDEN

Nama

:

Jenis Kelamin

:

Umur

:

Jabatan

:

Tanggal Wawancara

:

C. PANDUAN

1. Wawancara ini dibuat hanya untuk keperluan perkuliahan dan penelitian
2. Wawancara ini tidak mengandung unsur politik.
3. Identitas Responden akan di jaga kerahasiaannya.

D. PERTANYAAN

I. Indikator Transparansi Anggaran Desa

1. Apakah Bapak/Ibu sudah membuat Anggaran Desa Banjar Benai menggunakan Aplikasi Anggaran Desa dengan memanfaatkan Internet yang telah tersedia di Kantor Kepala Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ini?

2. Bagaimana cara Bapak/Ibu mempublikasikan Anggaran Desa kepada masyarakat Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ini?

II. Indikator Sistem Informasi Desa

1. Apakah Informasi Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ini sudah bisa di akses oleh Pemerintah daerah secara Online?
2. Apakah Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ini sudah memiliki Website Desa sebagai media informasi resmi yang bisa di akses oleh semua orang?

III. Indikator Media Komunikasi Desa

1. Apakah masyarakat Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi sudah menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Desa dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi Desa?
2. Apakah Pemerintah Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan internet untuk membantu dalam berkampanye secara nasional seperti Program Keluarga Berencana, Sensus Penduduk Online 2020?

IV. Indikator Media Promosi

1. Apasaja Produk-Produk khas Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi yang sudah di Promosikan secara online?
2. Adakah potensi Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi yang Sudah di Promosikan di media sosial?

DAFTAR KUESIONER

A. IDENTITAS PENELITI

Nama : Kurnia Permadani
 NPM : 160411054
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ilmu Sosial
 Universitas : Universitas Islam Kuantan Singingi
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Banjar Benai
 No. Hp : 081270248877
 Judul Penelitian : Implementasi Program Internet Desa Pintar
 di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai

Kabupaten Kuantan Singingi.

B. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
 Jenis Kelamin :
 Umur :
 Pekerjaan :
 Tanggal Pengisian Angket :

C. PANDUAN

1. Wawancara ini dibuat hanya untuk keperluan perkuliahan dan penelitian
2. Wawancara ini tidak mengandung unsur politik.
3. Identitas Responden akan di jaga kerahasiaannya.
4. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang anda rasa benar.

D. PERTANYAAN

I. Indikator Transparansi Anggaran Desa

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui bahwa Anggaran Desa dapat di akses menggunakan Aplikasi Anggaran Desa dengan memanfaatkan Internet yang telah tersedia di Kantor Kepala Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ?
 - a. Sudah
 - b. Ragu-ragu
 - c. Belum

2. Apakah internet yang tersedia di Kantor Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ini sudah bermanfaat bagi Bapak/Ibu untuk mengetahui Anggaran Desa?
 - a. Sudah
 - b. Ragu-ragu
 - c. Belum

II. Indikator Sistem Informasi Desa

1. Apakah Bapak/Ibu pernah menggunakan internet di kantor Desa Banjar Benai untuk melihat informasi Pemerintah Desa maupun Daerah?
 - a. Sering
 - b. Sekali-sekali
 - c. Tidak Pernah

2. Apakah Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ini sudah memiliki Website Desa sebagai media informasi resmi yang bisa di akses oleh semua masyarakat?
 - a. Sudah
 - b. Ragu-ragu
 - c. Belum

III. Indikator Media Komunikasi Desa

1. Apakah Bapak/Ibu pernah menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Desa dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi Desa?
 - a. Pernah
 - b. Ragu-ragu
 - c. Tidak Pernah

2. Apakah Pemerintah Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan internet untuk berkampanye secara nasional seperti Program Keluarga Berencana, Sensus Penduduk Online 2020?
 - a. Iya
 - b. Ragu-ragu
 - c. Tidak

IV. Indikator Media Promosi

1. Adakah Produk-Produk khas Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi yang sudah di Promosikan dan dipasarkan secara online?
 - a. Ada
 - b. Ragu-ragu
 - c. Tidak ada
2. Menurut Bapak/Ibu adakah potensi Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi yang Sudah di Promosikan di media sosial?
 - a. Ada
 - b. Ragu-ragu
 - c. Tidak ada



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN BENAI
DESA BANJAR BENAI**

SURAT KETERANGAN

Nomor: /SK/BB/III/2020

Kepala Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **KURNIA PERMADANI**
NPM : 160411054
Program Studi : Ilmu Administrasi negara
Semester : VIII (delapan)
Fakultas : Ilmu Sosial
Universitas : Universitas Islam Kuantan Singingi

Telah melakukan Penelitian / Pengumpulan Data dalam rangka
penyusunan Skripsi, berlokasi di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten
Kuantan Singingi.

Dengan judul Skripsi “ **Implementasi Sistem Informasi Desa di Desa
Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi**”.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Banjar Benai, Maret 2020
Kepala Desa Banjar Benai

EDI SAPRI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 28 Januari 1997. Merupakan anak pertama dari empat orang bersaudari dari pasangan Edi Sapri dan Zainab. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 008 Banjar Benai pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 009 Talontam Benai dan lulus pada tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 01 Benai dan lulus pada tahun 2014. Setelah menyelesaikan tiga tingkatan pendidikan ini pada tahun 2014 penulis melanjutkan kuliah di STIKES Perintis Padang dengan Program Studi S1 Ilmu Gizi namun penulis hanya menyelesaikan satu semester saja karena terhambat masalah finansial. Kemudian pada tahun 2016 penulis pun melanjutkan lagi studi dengan mendaftar di Universitas Islam Kuantan Singingi dengan mengambil Jurusan Administrasi Negara fakultas Ilmu Sosial. Pada tahun 2020 ini penulis melaksanakan penelitian skripsi di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dengan judul Skripsi **“IMPLEMENTASI PROGRAM INTERNET DESA PINTAR DI DESA BANJAR BENAI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**.

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 30 Maret 2020

Penulis

KURNIA PERMADANI

NPM. 160411054